



LKJIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2021



Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, dan Kependudukan
Provinsi Jawa Timur

Jl. Jagir Wonokromo No. 358 Surabaya 60244

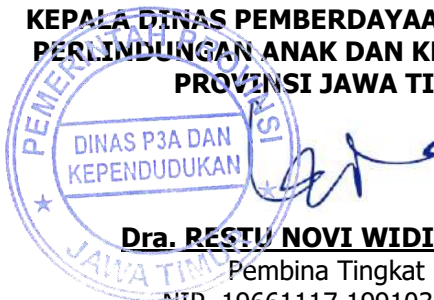
KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja diukur berdasarkan indikator sasaran dan target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2021. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi sarana evaluasi bagi seluruh jajaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur agar memacu kinerja ke depan lebih produktif, professional, efektif dan efisien dalam rangka untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Terima kasih.

Surabaya, 17 Januari 2022

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KEPENDUDUKAN
PROVINSI JAWA TIMUR**



Dra. RESTU NOVI WIDIANI, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19661117 199103 2 008

EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)

➤ **Mekanisme Penyusunan**

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Tahun 2021 yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.

Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

➤ **Mekanisme Pengukuran**

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021 telah menetapkan 1 (satu) Tujuan dan 4 (empat) Sasaran. Keempat sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 5 (lima) indikator kinerja.

Ringkasan prestasi capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA				
		NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
	Tujuan : Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70,97	73,03	102,90
1	Meningkatnya kualitas kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak	1	Indek Pengarutamaan Gender (PUG)	0,94	0,97	103,19
		2	Indek Perlindungan Anak (IPA)	71,80	72,25*	100,62
2	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kependudukan	3	Persentase Lembaga yang memanfaatkan Profil Kependudukan Provinsi Jawa Timur	100%	100%	100
3	Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga	4	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	1,91	2,21	84,29
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	5	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	82,23	82,16	99,91

- Ringkasan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur :
- Ikhtisar pencapaian sasaran tahun 2021 sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur yang mendukung kebijakan strategis Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan kebijakan strategis Pemerintah Pusat yaitu Pengarusutamaan Gender (pro-gender). Pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur didukung 14 (empat belas) program yaitu :
1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
 2. Program Perlindungan Perempuan;
 3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
 4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
 5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);
 6. Program Perlindungan Khusus Anak;
 7. Program Pendaftaran Penduduk;
 8. Program Pencatatan Sipil;
 9. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
 10. Program Pengelolaan Profil Kependudukan;
 11. Program Pengendalian Penduduk;
 12. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);
 13. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera(KS);

14. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

- Pemanfaatan Laporan Kinerja untuk :
 - Mengukur kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur dalam menunjang keberhasilan pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
 - Penyempurnaan dokumen perencanaan pada periode yang akan datang;
 - Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
 - Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan.

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	I
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	
BAB I : PENDAHULUAN	1
A Struktur Organisasi	1
B Tugas dan Fungsi	4
C Isu Strategis	5
D Cascading Kinerja	7
E Peta Proses Bisnis	14
F Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi	17
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	18
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	
A Capaian Kinerja Organisasi	22
B Realisasi Anggaran	51
C Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	60
BAB IV : PENUTUP	62
LAMPIRAN - LAMPIRAN	
A. Form Pendanaan Indikatif pada Renstra	
B. Perjanjian Kinerja	
C. Rekapitulasi Data	
D. Cascading Kinerja (Keterhubungan dengan RPJMD 2019-2024)	

BAB I

PENDAHULUAN

A. STRUKTUR ORGANISASI

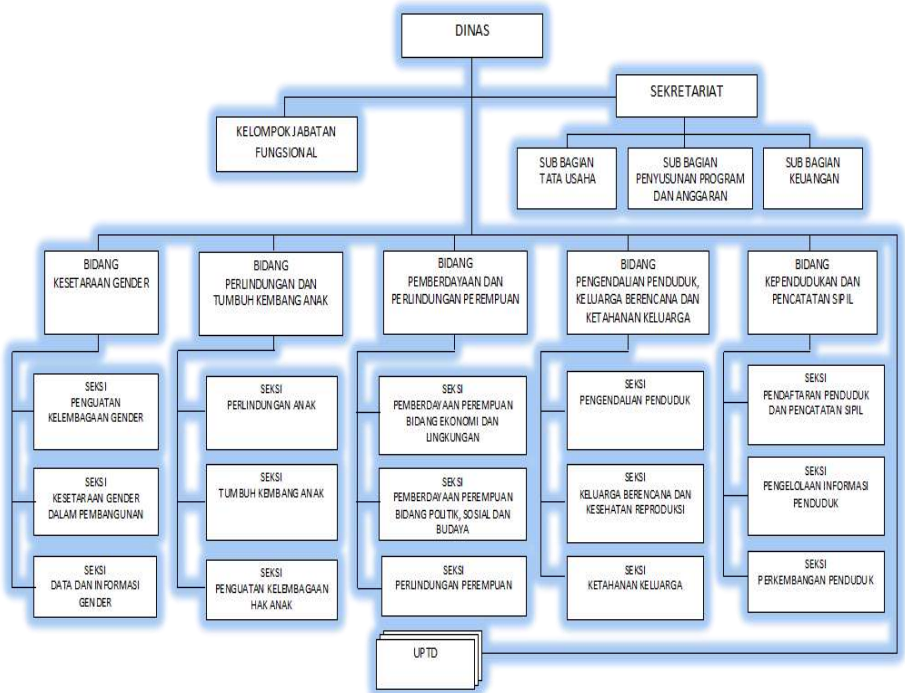
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur dibentuk atas dasar Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, pada Bab III pasal 3 poin 9 bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kependudukan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang :

- a. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

Kantor DP3AK Provinsi Jawa Timur beralamat di Jalan Jagir Wonokromo No. 358, Surabaya, Kelurahan Wonocolo, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya.

Dalam melaksanakan 3 urusan, DP3AK Provinsi Jawa Timur dikepalai seorang Kepala Dinas, yang membawahi Sekretariat dan 5 (lima) Bidang yaitu : (1) Bidang Kesetaraan Gender; (2) Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak; (3) Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan; (4) Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga; serta (5) Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI JAWA TIMUR**
(Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 37 Tahun 2019)



Berdasarkan Struktur Organisasi di atas, dapat digambarkan bahwa :

Sekretariat, membawahi 3 sub bagian yaitu :

- 1) Sub Bagian Tata Usaha;
- 2) Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran; dan
- 3) Sub Bagian Keuangan.

Bidang Kesetaraan Gender membawahi :

- 1) Seksi Penguatan Kelembagaan Gender;
- 2) Seksi Kesetaraan Gender dalam Pembangunan; dan
- 3) Seksi Data dan Informasi Gender.

Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak, membawahi :

- 1) Seksi Perlindungan Anak;
- 2) Seksi Tumbuh Kembang Anak; dan
- 3) Seksi Penguatan Kelembagaan Hak Anak.

Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan,
membawahi :

- 1) Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi dan Lingkungan;
- 2) Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Sosial, dan Budaya; dan
- 3) Seksi Perlindungan Perempuan.

Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga, membawahi :

- 1) Seksi Pengendalian Penduduk;
- 2) Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi; dan
- 3) Seksi Ketahanan Keluarga.

Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, membawahi :

- 1) Seksi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- 2) Seksi Pengelolaan Informasi Penduduk; dan
- 3) Seksi Perkembangan Penduduk.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka diterbitkanlah Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 37 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis adalah suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Organisasi Perangkat Daerah dimasa yang akan datang. Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal

maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur dapat dirangkum sebagai berikut :

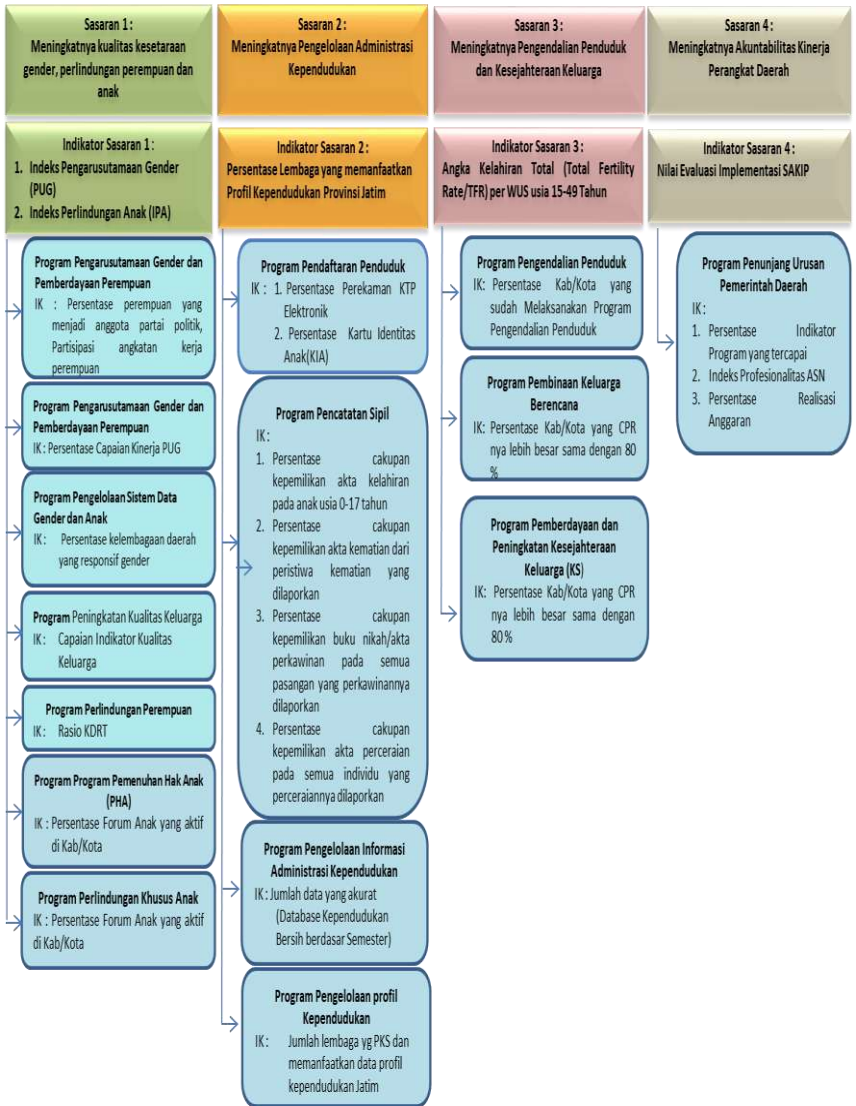
1. Peningkatan Kesetaraan Gender (gender equality) di Jawa Timur
2. Internalisasi dan Penguatan Aksi Pemenuhan Hak Anak Lintas Sektor dan di seluruh level pemerintahan sebagai upaya percepatan pencapaian 5 klaster dan 24 Indikator kab/Kota layak Anak
3. Pencegahan dan Penanganan terhadap Tindakan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak melalui Pelibatan Peran serta Masyarakat
4. Pencegahan dan Pendampingan/Advokasi terhadap Tindakan Perdagangan Orang (TPPO) secara Berkelanjutan
5. Edukasi berbasis Masyarakat untuk Pencegahan pernikahan Pada Usia Anak
6. Upaya Strategis Penguatan Keterwakilan Perempuan di Parlemen dan Lembaga Publik Lainnya
7. Pengakuan dan Peningkatan Kapasitas Perempuan pelaku Ekonomi Sektor Informal
8. Pemantapan database Kependudukan yang Menjadi Kewenangan Provinsi secara Berkelanjutan
9. Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk Jawa Timur

D. CASCADING KINERJA

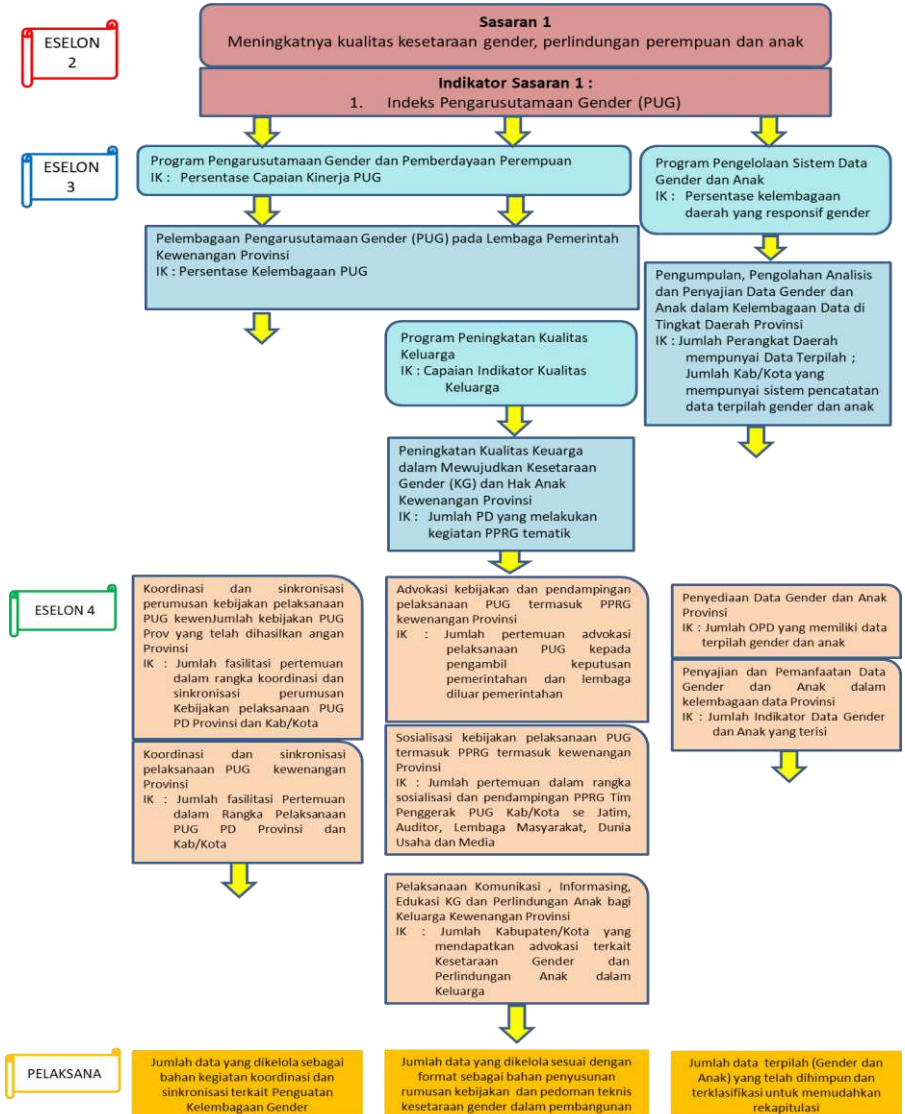
Cascading Kinerja ini untuk memberikan gambaran keterhubungan antara RPJMD Provinsi Jawa Timur dengan Renstra DP3AK Provinsi Jawa Timur, serta tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Dinas sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi bagi pejabat eselon yang ada dilingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Kependudukan yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

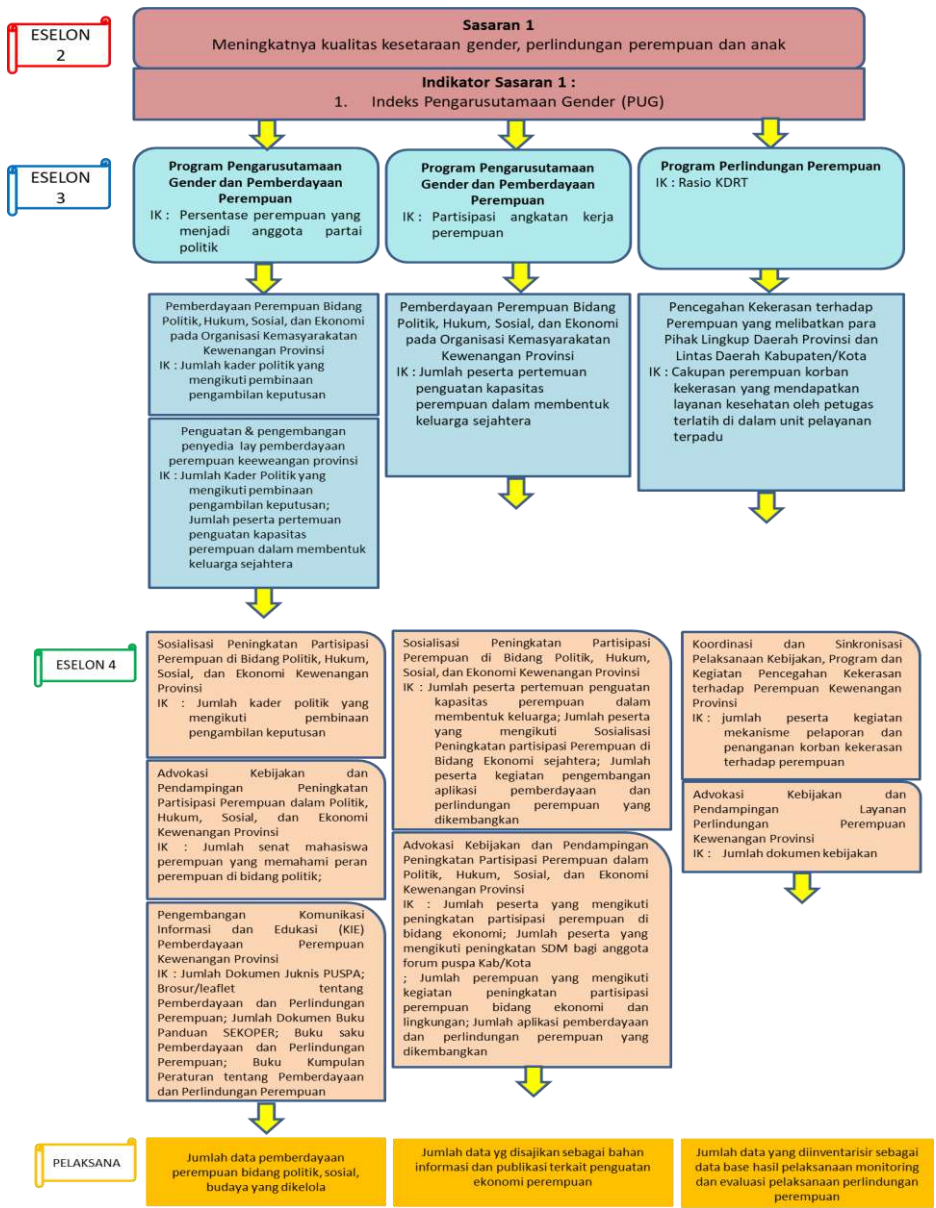
Keterkaitan RPJMD Perubahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 dengan Renstra Perubahan Tahun 2019-2024 DP3AK Provinsi Jawa Timur

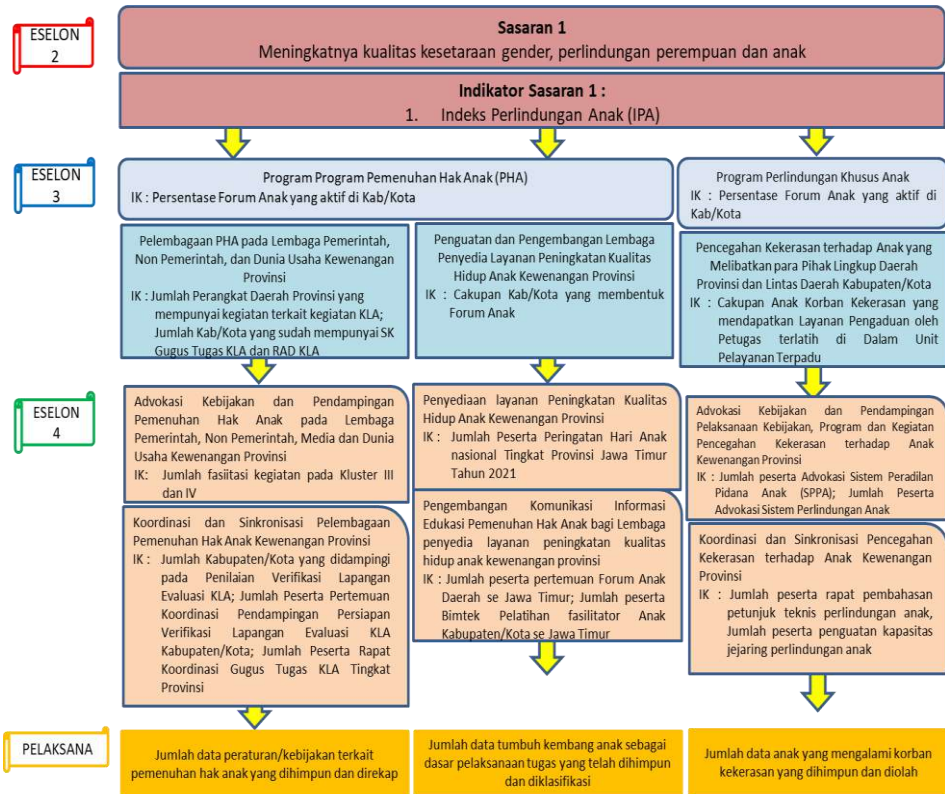




CASCADING KINERJA PER SASARAN







ESELON 2

Sasaran 2
Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kependudukan

Indikator Sasaran 2 :
Persentase Lembaga yang memanfaatkan Profil Kependudukan Provinsi Jawa Timur

ESELON 3

Program Pendaftaran Penduduk
IK : 1. Persentase Perekaman KTP Elektronik
2. Persentase Kartu Identitas Anak(KIA)

Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
IK : Jumlah data yang akurat (Database Kependudukan Bersih berdasar Semester)

Program Pengelolaan profil Kependudukan
IK : Jumlah lembaga yg PKS dan memanfaatkan data profil kependudukan Jatim

Pelayanan Pendaftaran Kependudukan
IK : Jumlah Kab/Kota yang mengirimkan Laporan Data Kependudukan sesuai standar dan tepat waktu; Jumlah kab/kota yang melaporkan anak yang mendapatkan akte kelahiran

Penataan pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan
IK : Jumlah Kab/Kota yang Pelayanan Adminiduknya terkonsolidasi dan terintegrasi Big Database berbasis Penugalan NIK sesuai Standar

Penyediaan profil Kependudukan
IK : Profil Kependudukan Prov. Jatim yg valid dan update

Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan
IK : Kepemilikan Dokumen Kependudukan KTP

Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi
IK : Jumlah Kab/Kota yang sudah mendapatkan Bimbingan Teknik ADB; Jumlah buku data kependudukan per semester dan buletik kependudukan Provinsi Jawa Timur yang diterbitkan

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan
IK : Jumlah kab/kota yang melaporkan anak yang mendapatkan akte kelahiran

Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi
IK : Jumlah Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan SIAK dan Data Pelayanan Kependudukan yg telah terkonsolidasi dgn BIG Data

Program Pencatatan sipil
IK : Persentase cakupan kepemilikan akte kelahiran pada anak usia 0-17 tahun; Persentase cakupan kepemilikan akte kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan; Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akte perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan; Persentase cakupan kepemilikan akte perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan

Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi
IK : Kepemilikan Dokumen Kependudukan KTP; Persentase Kab/Kota yang telah melaksanakan Pelayanan pencatatan Sipil penduduk sesuai standar

Pelayanan Pencatatan Sipil
IK : Persentase Kab/Kota yang telah menyelenggarakan pendaftaran Kependudukan sesuai standar
IK : Persentase Kab/Kota yang melaksanakan pelayanan pencatatan Sipil sesuai standar

Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
IK : Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

ESELON 4

Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil
IK : Jumlah Kab/Kota yang telah melaksanakan kebijakan teknis di bidang pencatatan sipil berdasarkan kebijakan nasional

Penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penyusunan laporan adminduk terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan
IK : Jumlah Kab/Kota yang mengikuti Peningkatan SDM dan SOP Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpadu di Jawa Timur

Penyediaan data kependudukan provinsi
IK : 1. Jumlah data registrasi dari Kab/Kota
2. Jumlah peserta peningkatan SDM dalam rangka Pengembangan Penyelarasan Program Administrasi Kependudukan se Jawa Timur

Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi
IK : Jumlah Kab./kota yang telah melaksanakan SOP Pelayanan Pencatatan Sipil

Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang berifat Data Penseoran, data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota
IK : Jumlah peserta Pembinaan SDM penyusunan SOP, program kerja, monitoring, evaluasi dan Pengelolaan Data Kependudukan Kab./kota

Penyusunan profil Data perkembangan dan proyeksi Kependudukan Serta kebutuhan yang lain
IK : 1. Jumlah Profil Perkembangan Kependudukan yang telah disusun
2. Jumlah Profil yang telah diinvertisir dari Kab/Kota

Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil
IK : Jumlah Kab/Kota yang mengikuti Peningkatan SDM dan SOP Kebijakan Pencatatan Sipil di Jawa Timur

Fasilitasi terkait pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
IK : Jumlah Kab/Kota yang difasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil
IK : Pembinaan, Fasilitasi, Sosialisasi, Bimbingan Teknik, Advokasi, supervisi dan Konsultasi Pencatatan Sipil Kab/Kota

Sosialisasi terkait pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
IK : Jumlah Kab/Kota yang tersosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil
IK : Peningkatan SDM Petugas Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil Kab/Kota

Komunikasi, Informasi, Edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat
IK : Jumlah Informasi Administrasi Kependudukan

Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil
IK : Jumlah Kab/Kota yang telah melaksanakan Pencatatan Sipil Penduduk sesuai standar

Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
IK : Jumlah Fasilitas Pemanfaatan Data Kependudukan dgn OPD, Lembaga dan Lembaga Non Pemerintah

Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil
IK : Jumlah Kab./kota yang mengikuti Bimtek terkait Pencatatan Sipil

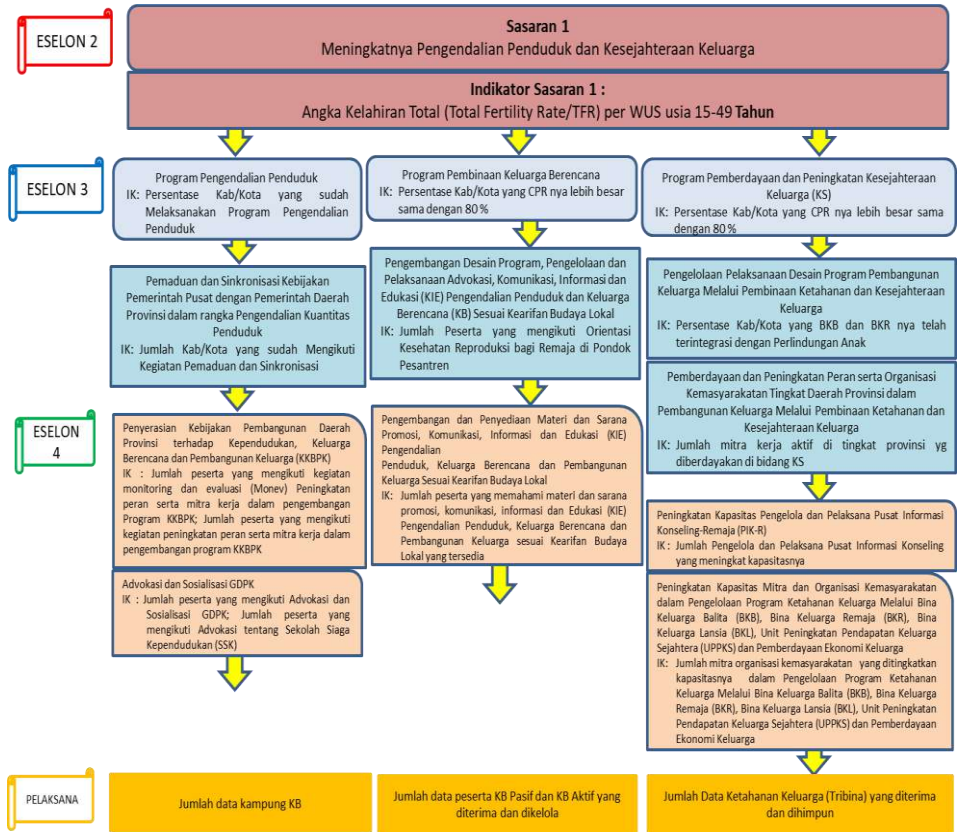
Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
IK : Jumlah Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan SIAK dan Data Kependudukan yang telah terkonsolidasi oleh Pusat

PELAKSANA

Jumlah laporan bulanan data kependudukan

Data kependudukan bersih per semester

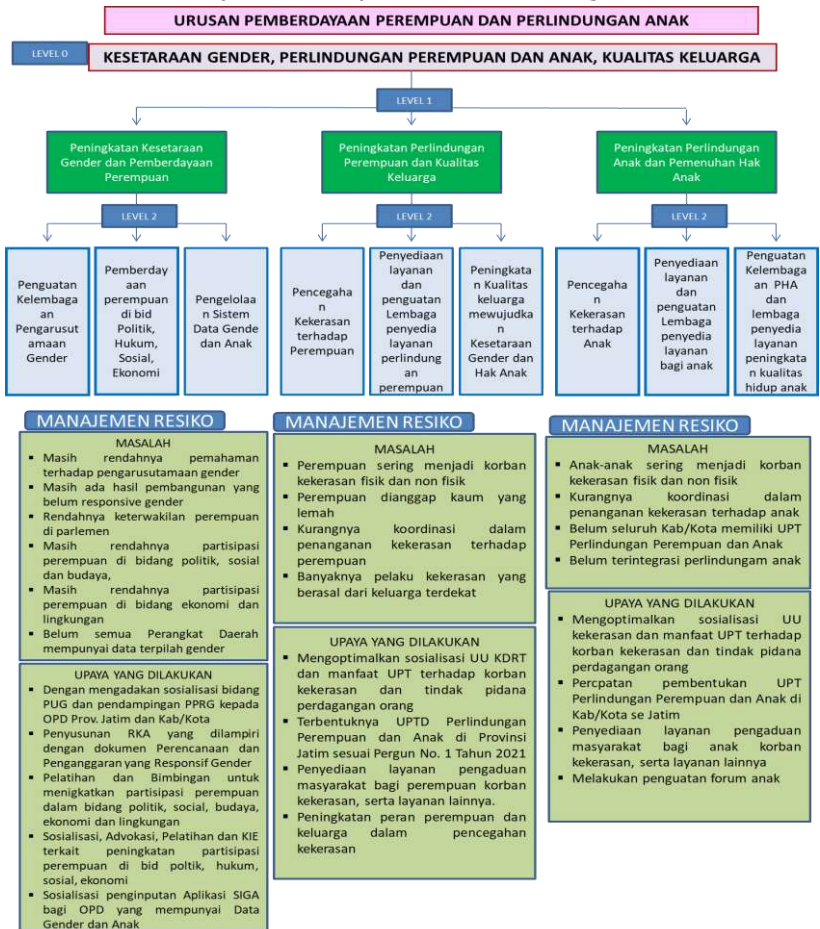
Jumlah laporan Monev



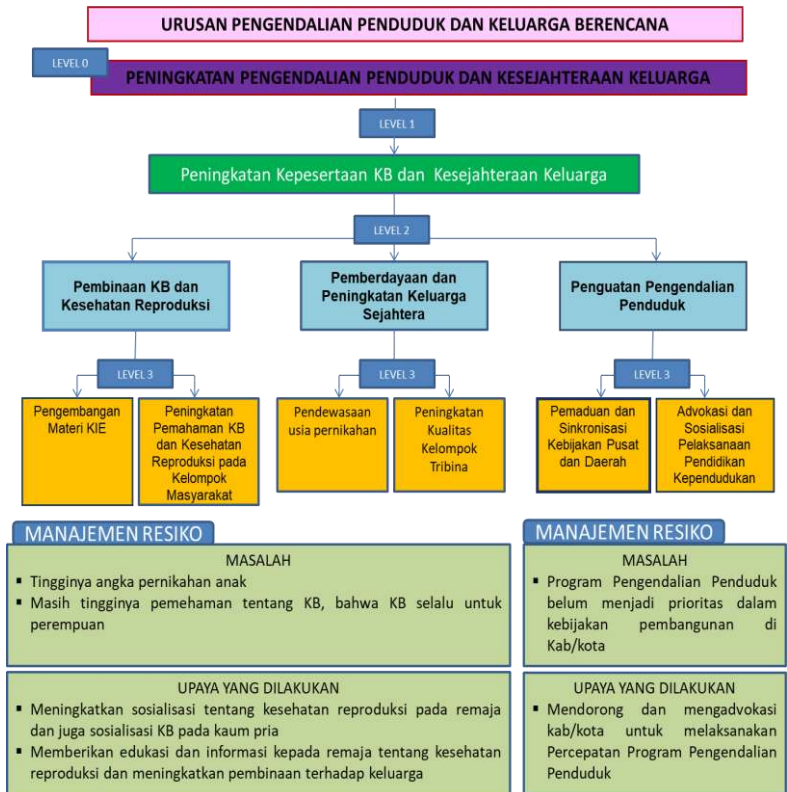
E. PETA PROSES BISNIS

Untuk menjalankan fungsi DP3AK Provinsi Jawa Timur dalam menangani 3 urusan pemerintahan, diperlukan pemetaan proses bisnis, sehingga tujuan dapat dicapai. Adapun proses bisnis untuk masing-masing urusan adalah sebagai berikut :

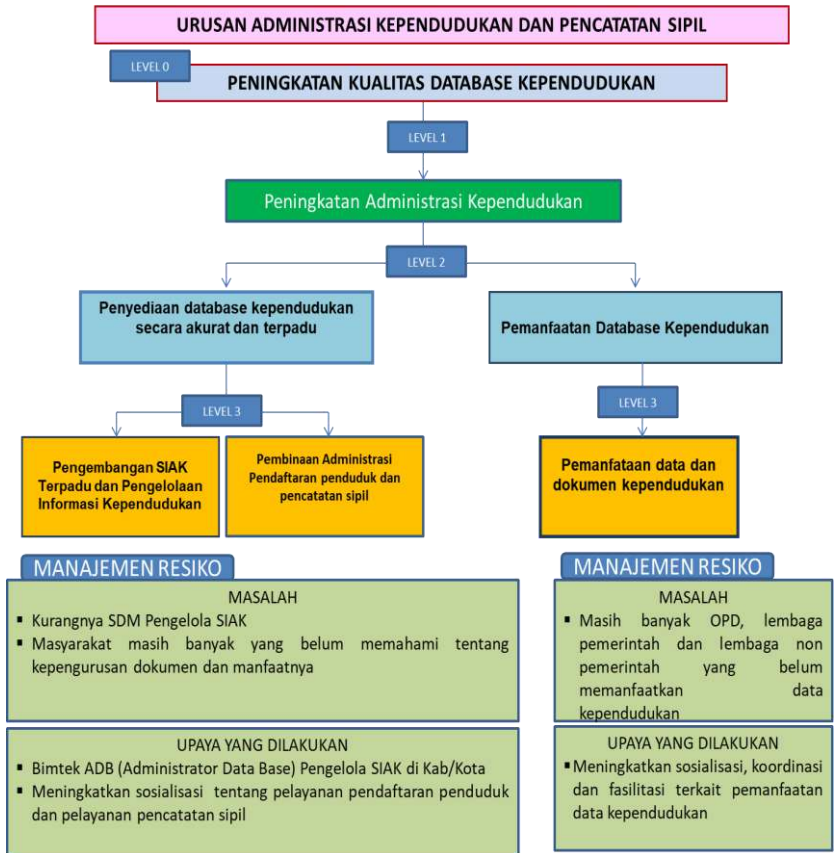
1. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



2. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



3. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil



F. RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI

Berdasarkan dari Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DP3AK yang dilakukan oleh Tim Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021, maka dapat disimpulkan hasil sebagai berikut :

1. Secara umum DP3AK Provinsi Jawa Timur telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pelaksanaan dari manajemen kinerja;
2. Penyusunan dokumen perencanaan telah dijabarkan ke berbagai sasaran dan indikator kinerja keseluruh ASN di semua level. Hal yang perlu diperhatikan adalah ketercukupan ukuran keberhasilan yang mengindikasikan tercapainya kinerja;
3. Belum sepenuhnya dilakukan monitoring dan evaluasi atas Perjanjian Kinerja yang telah disusun;
4. Implementasi Akuntabilitas Kinerja sebagai salah satu budaya kinerja masih bersifat parsial dan belum dilaksanakan secara merata pada seluruh instansi.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja DP3AK Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 tertuang dalam Renstra Perubahan tahun 2019-2024. Perjanjian Kinerja DP3AK Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 yang telah disusun dalam rentang waktu 1 (satu) tahun bertujuan untuk mewujudkan kinerja Output maupun Outcome, serta untuk mewujudkan manajemen pemerintahan efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil. Perjanjian Kinerja DP3AK Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 dijadikan acuan untuk mengukur Kinerja Tahun 2021 dan melaporkannya dalam LKjIP, sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

A. PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2019-2024

Pada Tahun 2021, DP3AK Provinsi Jawa Timur melaksanakan 1 (satu) Tujuan dan 4 (empat) Sasaran, sebagaimana tertuang dalam Dokumen Perubahan Renstra Tahun 2019-2024. Adapun Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target tercantum pada tabel di bawah ini.

**Tabel Tujuan, Sasaran dan Indikator
Perubahan Renstra Tahun 2019-2024**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Realisasi		Target			
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	73,04	73,03	70,97	71,37	71,77	72,17
		Meningkatnya kualitas kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pengarusutamaan Gender (PUG)	Indeks	-	0,93	0,94	0,95	0,96	0,97
			Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	71,80	72,25	71,80	71,80	71,85	71,90
		Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Persentase Lembaga yang memanfaatkan Profil Kependudukan Provinsi Jawa Timur	Persen	-	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Persen	2,28	2,29	1,91	1,89	1,86	1,83
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	-	81,30	82,15	82,23	82,31	82,39	82,47

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Untuk menunjang pencapaian 4 (empat) Sasaran Strategis Tahun 2021 didukung dengan pagu anggaran P-APBD Tahun 2021 sebesar Rp. 29.829.285.689,-. Adapun Perjanjian Kinerja serta Program dan Kegiatan Tahun 2021 yang mendukung tercapainya sasaran Renstra DP3AK Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
1. Meningkatnya kualitas kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak	1. Indeks Pengarusutamaan Gender (PUG)	0,94	1. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	2.660.286.705,-
			2. Program Perlindungan Perempuan	2.062.611.500,-
			3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga	28.842.000,-
			4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	517.032.000,-
	2. Indeks Perlindungan Anak (IPA)	71,80	1. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	1.701.923.693,-
			2. Program Perlindungan Khusus Anak	1.395.542.431,-
2. Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kependudukan	3. Persentase Lembaga yang memanfaatkan Profil Kependudukan Provinsi Jawa Timur	100%	1. Program Pendaftaran Penduduk	944.950.500,-
			2. Program Pencatatan Sipil	851.907.500,-
			3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.061.017.500,-
			4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan	248.186.722,-

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)
3. Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga	4. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	1,91	1. Program Pengendalian Penduduk	499.000.000,-
			2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	200.500.000,-
			3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	323.731.025,-
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	5. Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	82,23	1. Program Penunangan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	17.333.754.113,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja DP3AK Provinsi Jawa Timur adalah bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja tujuan dan sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan rumus sebagai berikut:

a. Tingkat Realisasi Positif :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Sedangkan untuk kategori capaian digunakan sebagai berikut :

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75% sampai dengan 100%	Baik
3	55% sampai 75 %	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

Untuk setiap pernyataan kinerja tujuan dan sasaran strategis tersebut, dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

Tujuan :
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan

Keberhasilan pencapaian Tujuan ini diukur melalui indikator kinerja Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Tabel Pencapaian Kinerja Tahun 2021

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70,97	73,03*	102,90

Catatan : *) Realisasi IDG tahun 2021 adalah Data Tahun 2020

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian Indikator **Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)** Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 70,97 dan realisasi tahun 2021 sebesar 73,03*, tingkat capaian sebesar 102,90%. Data realisasi tahun 2021 masih

menggunakan data IDG tahun 2020 yang bersumber dari BPS, dikarenakan data tahun 2021 dari BPS masih dalam tahap pengumpulan data akan dipublikasikan pada akhir tahun 2022.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) didukung dari 3 (tiga) komponen, yaitu :

1. Keterlibatan perempuan dalam parlemen
2. Perempuan sebagai tenaga profesional
3. Sumbangan pendapatan perempuan

Capaian terhadap masing-masing komponen IDG menunjukkan adanya upaya dalam pembangunan yang responsif gender yang bertujuan untuk memperjuangkan kesetaraan gender sesuai amanah SDGs dan RPJMN 2019-2024 serta RPJMD 2019-2024 Provinsi Jawa Timur yaitu terwujudnya Kesetaraan Gender, melalui kemudahan AKSES perempuan dalam segala bidang pembangunan; memberikan kesempatan bersuara atau PARTISIPASI; memudahkan untuk dapat bagian dalam ikut mengambil keputusan atau KONTROL pembangunan serta menerima hasil atau MANFAAT pembangunan yang dilihat melalui indikator-indikator komponen pendukung IDG tersebut.

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70,97	73,04	73,03	73,03*

Realisasi IDG di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019 sebesar 73,04. Sedangkan pada Tahun 2020 realisasi IDG sebesar 73,03, lebih rendah 0,01 poin dibandingkan dengan IDG Tahun 2019.

Tabel Komponen Pendukung IDG Jawa Timur

Tahun	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Perempuan Sebagai Tenaga Profesional (%)	Sumbangan Pendapatan Perempuan (%)	IDG
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
2019	18,33	48,90	35,68	73,04
2020	18,33	49,65	35,81	73,03

Berdasarkan capaian dalam tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa :

1. Keterlibatan perempuan di parlemen pada tahun 2019 sebesar 18,33%. Komponen ini tidak mengalami kenaikan maupun penurunan pada tahun 2020. Komponen keterlibatan perempuan di parlemen di Jawa Timur pada tahun 2020 masih lebih rendah jika dibandingkan dengan nasional yaitu sebesar 21,09%.
2. Perempuan sebagai Tenaga Profesional, pada tahun 2019 sebesar 48,90% dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 49,65%. Komponen ini mengalami kenaikan sebesar 0,75 poin jika dibandingkan tahun 2019. Komponen perempuan sebagai tenaga profesional di Jawa Timur lebih tinggi jika dibandingkan dengan nasional yaitu sebesar 48,76%.
3. Sumbangan Pendapatan Perempuan, pada tahun 2019 sebesar 35,68% dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 35,81%.

Komponen ini mengalami kenaikan sebesar 0,13 poin jika dibandingkan tahun 2019. Komponen Sumbangan pendapatan perempuan di Jawa Timur lebih rendah jika dibandingkan dengan nasional yaitu sebesar 37,26%.

Menurut penjelasan komponen IDG dapat disimpulkan bahwa adanya peningkatan kinerja pada 2 (dua) komponen IDG. Namun demikian capaian IDG nya turun.

Berikut ini adalah Capaian IDG dan komponennya menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Masing-masing Kab/Kota bervariasi bahkan banyak Kab/Kota yang capaiannya lebih tinggi dibandingkan provinsi. Capaian IDG ini tidak bersifat kumulatif dari Kab/Kota. Sehingga capaian Kabkota tidak bisa mendorong capaian provinsi.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Komponennya Tahun 2020

No	Kab/Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Perempuan Sebagai Tenaga Profesional (%)	Sumbangan Pendapatan Perempuan (%)	IDG
1	Pacitan	13,33	50,20	39,92	68,64
2	Ponorogo	13,33	50,89	35,62	67,48
3	Trenggalek	11,11	56,12	37,74	66,11
4	Tulungagung	12,00	57,83	38,45	65,84
5	Blitar	24,00	50,83	40,33	80,32
6	Kediri	22,00	53,14	31,66	72,17
7	Malang	14,00	50,75	36,98	69,54
8	Lumajang	16,00	48,94	23,66	58,91
9	Jember	16,00	46,52	30,78	65,61
10	Banyuwangi	26,00	49,09	31,00	74,41
11	Bondowoso	11,11	47,50	37,60	65,06
12	Situbondo	28,89	50,82	27,85	72,80
13	Probolinggo	26,00	47,74	25,59	68,69
14	Pasuruan	12,00	52,57	34,92	65,99
15	Sidoarjo	16,00	51,61	29,64	67,20
16	Mojokerto	28,00	48,95	35,06	79,87
17	Jombang	28,00	52,75	27,87	73,42
18	Nganjuk	26,00	46,16	26,07	69,90
19	Madiun	22,22	57,93	30,65	69,53
20	Magetan	11,11	51,79	38,73	66,68
21	Ngawi	25,00	46,07	32,06	72,88
22	Bojonegoro	10,00	48,86	26,34	55,77
23	Tuban	14,00	53,65	30,77	64,00
24	Lamongan	24,00	45,44	33,62	73,93

No	Kab/Kota	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Perempuan Sebagai Tenaga Profesional (%)	Sumbangan Pendapatan Perempuan (%)	IDG
25	Gresik	12,00	42,85	31,58	63,29
26	Bangkalan	8,00	38,05	35,67	58,54
27	Sampang	6,67	41,94	31,34	55,91
28	Pamekasan	4,44	37,21	33,87	53,01
29	Sumenep	8,00	33,93	36,67	58,22
30	Kota Kediri	36,67	48,07	35,85	84,38
31	Kota Blitar	12,00	50,46	38,74	68,35
32	Kota Malang	26,67	52,84	34,40	78,06
33	Kota Probolinggo	13,33	45,64	31,40	65,92
34	Kota Pasuruan	3,33	44,53	31,86	54,58
35	Kota Mojokerto	32,00	57,89	37,13	81,99
36	Kota Madiun	23,33	52,54	38,09	77,18
37	Kota Surabaya	32,00	53,24	35,88	82,86
38	Kota Batu	16,67	47,59	30,57	68,91
Jawa Timur		18,33	49,65	35,81	73,03
Indonesia		21,09	48,76	37,26	75,57

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Akhir Periode RENSTRA

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	72,17	73,03*	101,19%

Jika capaian IDG tahun 2020 sebesar 73,03 dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 74,24, maka tingkat kemajuannya sebesar 101,19%.

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Standar Nasional

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Realisasi Provinsi Jawa Timur	Realisasi Nasional	Ket (+/-)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73,03	75,57	- 2,54



Pada Tahun 2020, angka IDG Provinsi Jawa Timur sebesar 73,03 lebih rendah 2,54 poin dari angka IDG Nasional sebesar 75,57. Hal ini dikarenakan dari komponen keterlibatan perempuan di parlemen, dimana Provinsi Jawa Timur sebesar 18,33% lebih rendah 2,76 poin dari Nasional yaitu sebesar 21,09%.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja IDG merupakan upaya yang saling terkait dan saling terintegrasi antara pemerintah (eksekutif), perlemen (legislatif), maupun yudikatif dan semua komponen jejaring lembaga masyarakat, swasta dan lainnya serta peran serta masyarakat dalam mendukung pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Sasaran Strategis 1
Meningkatnya Kualitas Kesetaraan Gender,
Perlindungan Perempuan dan Anak

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis 1 diukur melalui indikator Indeks Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Indeks Perlindungan Anak (IPA).

Tabel Pencapaian Kinerja Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak	1. Indeks Pengarusutamaan Gender (PUG)	0,94	0,97	103,19
		2. Indeks Perlindungan Anak (IPA)	71,80	72,25	100,62

Catatan : *) Realisasi IPA tahun 2021 adalah Data Tahun 2020

Capaian Indikator Indeks Pengarusutamaan Gender (PUG) pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 0,94 dan realisasinya sebesar 0,97 tingkat capaian sebesar 103,19%. Indeks Pengarusutamaan Gender (PUG) disusun berdasarkan pelaksanaan 7 (tujuh) Prasyarat PUG yang dicapai Provinsi Jawa Timur. Hasil penilaian Anugerah Parahita Ekapraya Jawa Timur mendapatkan Kategori tertinggi yaitu Kategori Mentor, penghargaan ini juga dinilai dari 7 (tujuh) Prasyarat PUG, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. **Komitmen.** Jatim telah menunjukkan komitmen terhadap pembangunan responsive gender melalui regulasi Perda No 9 Tahun 2019 tentang PUG dan Pergub NO 39 Tahun 2020 tentang Penjelasan Perda No 9 Tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa Jatim berkomitmen.
- b. **Kebijakan.** RPJMD Tahun 2019-2024 Jawa Timur juga menunjukkan bahwa RPJMD tersebut adalah responsive gender karena salah satu strategi pembangunannya adalah Pengarusutamaan Gender (PUG). Demikian juga Renstra perangkat daerah telah mengikuti RPJMD tersebut.
- c. **Kelembagaan.** Telah terbentuk kelembagaan PUG di Jawa Timur yaitu Pokja PUG Jatim, Tim Penggerak PUG Jatim, Tim Teknis dan Focal Point PUG yang ada pada masing-masing perangkat daerah.
- d. **Sumber Daya.** Sudah 100% dan semua Kab/Kota di Jatim telah dilatih tentang PUG dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan Jatim juga telah mempunyai fasilitator PUG sebanyak 15 orang dan 76 fasilitator PUG Kabkota (masing-masing Kab/Kota 2 orang).
- e. **Sistem Informasi dan Data Terpilah.** Tahun 2020 Jawa Timur telah membuat sistem aplikasi data terpilah untuk memuat data gender dan anak perangkat daerah. Aplikasi ini belum tuntas karena masih ingin diintegrasikan dengan Satu Data Provinsi Jawa Timur. Selain itu telah tersusun buku saku data terpilah Tahun 2020.

- f. **Alat Analisis Gender.** Jawa Timur melaksanakan PPRG dengan menggunakan alat analisa Gender Analysis Pathway (GAB) ; Gender Budget Statemen (GBS) dan Term Of Reference (TOR) sebagai alat analisis yang telah disepakati baik Provinsi Jawa Timur dan Kab kota. Dengan menggunakan alat analisa tersebut Jawa Timur Tahun 2020 mempunyai persentase anggaran responsive gender sebanyak Rp 4,440,552,954,532 atau 37 % dari anggaran Pembangunan dan yang tidak menggunakan alat analisis tersebut sebesar 2,870,584,807,460 atau 24 % dari anggaran Pembangunan. Tahun 2020 juga telah dikembangkan aplikasi PPRG untuk memudahkan penyusunan PPRG bagi Kab/Kota.
- g. **Partisipasi Masyarakat.** Partisipasi yang telah dibangun Jawa Timur Bersama Lembaga masyarakat, dunia usaha, perguruan tinggi serta media massa telah diupayakan melalui program-program pemberdayaan perempuan, salah satu conotohnya adalah Partisipasi Publik untuk Perempuan dan Anak (PUSPA) selain itu juga telah adanya MoU dalam mendukung Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan & Anak dengan 7 Lemabaga Masyarakat. Demikian juga Jawa Timur sudah membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang akan beroperasi pada Tahun 2022. Dan masih banyak lagi kegiatan jejaring atau partisipasi masyarakat dalam PPA yang telah dilaksanakan di Jawa Timur.

Capaian Indikator Indeks Perlindungan Anak (IPA) pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 71,80 dan terealisasi sebesar 72,25*, dengan tingkat capaian sebesar 100,62%. Indeks Perlindungan Anak dihitung 27 Indikator, dimana :

- 5 indikator dari Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan
- 4 indikator dari Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
- 8 indikator dari Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
- 5 indikator dari Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya
- 5 indikator dari Klaster V Perlindungan Khusus

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Kualitas Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak	1. Indeks Pengarusutamaan Gender (PUG)	0,94	-	0,94	0,97
		2. Indeks Perlindungan Anak (IPA)	71,80	71,80	72,25	72,25*

Indeks Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Tahun 2021 sebesar 0,97, lebih tinggi 0,03 poin jika dibandingkan dengan Tahun 2020 sebesar 0,94.

Indeks Perlindungan Anak (IPA) pada Tahun 2021 sebesar 72,25*. Data realisasi Tahun 2021 masih menggunakan data IPA Tahun 2020 yang bersumber dari Kementerian PPPA RI, dikarenakan data Tahun 2021 masih dalam tahap pengumpulan data akan dipublikasikan pada akhir tahun 2022. Indeks Perlindungan Anak (IPA) pada Tahun 2020 sebesar 72,25, lebih tinggi 0,45 poin jika dibandingkan dengan Tahun 2019 sebesar 71,80.

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Akhir Periode RENSTRA

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kesetaraan Perlindungan dan Anak Kualitas Gender, Perempuan	1. Indeks Pengarusutamaan Gender (PUG)	0,97	0,97	100%
		2. Indeks Perlindungan Anak (IPA)	71,90	72,25*	100,48%

Capaian Indeks Pengarusutamaan Gender (PUG) tahun 2021 sebesar 0,97 dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 0,97, sudah mencapai target atau tingkat kemajuannya sebesar 100%.

Capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA) tahun 2021 sebesar 72,25* dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 71,90, sudah melebihi target atau tingkat kemajuannya sebesar 100,48%.

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Standar Nasional

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Realisasi Provinsi Jawa Timur	Realisasi Nasional	Ket (+/-)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak	1. Indeks Pengarusutamaan Gender (PUG)	0,97	-	-
		2. Indeks Perlindungan Anak (IPA)	72,25*	66,89*	

Catatan : *) Realisasi IPA tahun 2021 adalah Data Tahun 2020

Pencapaian Indikator Indeks Pengarusutamaan Gender (PUG) pada tahun 2021 tidak lepas dari komitmen Provinsi Jawa Timur dalam mengimplementasikan 7 (tujuh) Prasyarat Gender di Jawa Timur. Pada tahun 2020 Provinsi Jawa Timur mendapat ANUGERAH PARAHITA EKAPRAYA dengan predikat MENTOR. Sedangkan seluruh Kab/Kota di Jawa Timur juga mendapat ANUGERAH PARAHITA EKAPRAYA dengan berbagai predikat.

**PROVINSI JAWA TIMUR PADA TAHUN 2020
MENDAPAT PENGHARGAAN ANUGERAH PARAHITA EKAPRAYA**

**DAFTAR KABUPATEN/KOTA SE JAWA TIMUR
YANG MENERIMA PENGHARGAAN APE TAHUN 2020**

Jawa Timur mendapatkan ANUGERAH PARAHITA EKAPRAYA dengan predikat MENTOR

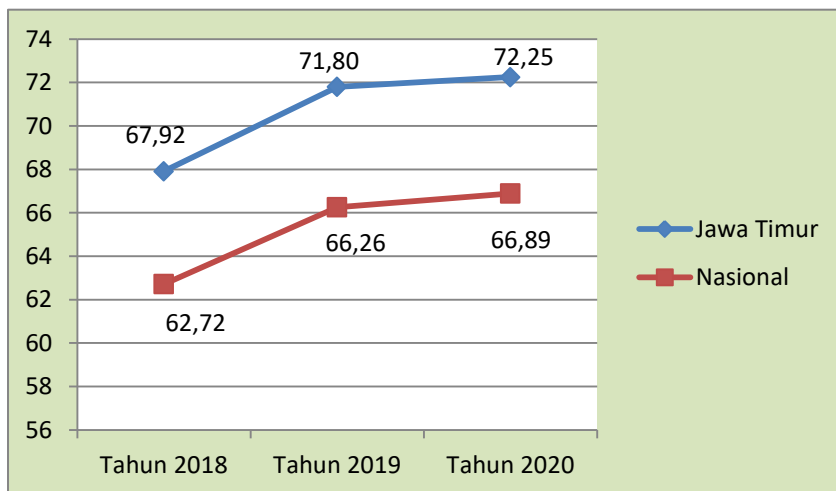
Dari 38 kab/kota terdapat 28 kab/kota yang mengalami peningkatan dan 1 kota yang mengalami penurunan

Tahun 2021 terdapat :

- 1) 8 kab/kota mendapatkan penghargaan APE kategori Pratama
- 2) 16 kab/kota mendapatkan penghargaan APE kategori Madya
- 3) 13 kab/kota mendapatkan penghargaan APE kategori Utama
- 4) 1 Kota mendapatkan penghargaan APE kategori Mentor

No	Kabupaten/Kota	Kategori APE	No	Kabupaten/Kota	Kategori APE
1	KAB. PACITAN	Pratama	20	KAB. MAGETAN	Madya
2	KAB. PONOROGO	Madya	21	KAB. NGAWI	Utama
3	KAB. TRENGGALEK	Utama	22	KAB. BOJONEGORO	Utama
4	KAB. TULLUNGAGUNG	Utama	23	KAB. TUBAN	Madya
5	KAB. BLITAR	Utama	24	KAB. LAMONGAN	Madya
6	KAB. KEDIRI	Pratama	25	KAB. GRESIK	Utama
7	KAB. MALANG	Utama	26	KAB. BANGKALAN	Pratama
8	KAB. LUMAJANG	Pratama	27	KAB. SAMPRANG	Pratama
9	KAB. JEMBER	Pratama	28	KAB. PAMEKASAN	Madya
10	KAB. BANYUWANGI	Madya	29	KAB. SUMENEP	Madya
11	KAB. BONDOWOSO	Pratama	30	KOTA KEDIRI	Madya
12	KAB. SITUBONDO	Madya	31	KOTA BLITAR	Madya
13	KAB. PROBOLINGGO	Utama	32	KOTA MALANG	Pratama
14	KAB. PASURUAN	Utama	33	KOTA PROBOLINGGO	Utama
15	KAB. SIDOARJO	Madya	34	KOTA PASURUAN	Madya
16	KAB. MOJOKERTO	Madya	35	KOTA MOJOKERTO	Madya
17	KAB. JOMBANG	Utama	36	KOTA MADIUN	Madya
18	KAB. NGANJUK	Madya	37	KOTA SURABAYA	Mentor
19	KAB. MADIUN	Utama	38	KOTA BATU	Utama

Grafik Indeks Perlindungan Anak Tahun 2018-2020



Dari grafik di atas dapat kita lihat bahwa dari Tahun 2018, 2019, dan 2020 Indeks Perlindungan Anak (IPA) menunjukkan kenaikan setiap tahunnya. IPA Provinsi Jawa Timur berada di atas IPA Nasional. Keberhasilan ini tidak lepas dari upaya Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak. Pada Tahun 2021 Provinsi Jawa Timur mendapatkan penghargaan sebagai Provinsi Layak Anak (Provila). Sedangkan seluruh Kab/Kota di Jawa Timur mendapatkan penghargaan Kab/Kota Layak Anak (KLA).

**PROVINSI JAWA TIMUR PADA TAHUN 2021
MENDAPAT PENGHARGAAN SEBAGAI PROVILA (PROVINSI LAYAK ANAK)**

**DAFTAR KABUPATEN/KOTA SE JAWA TIMUR
YANG MENERIMA PENGHARGAAN KLA TAHUN 2021**

Dari 38 kab/kota terdapat 12 kab/kota yang mengalami peningkatan dan 2 kab/kota yang mengalami penurunan

Tahun 2021 terdapat :

- 1) 13 kab mendapatkan penghargaan KLA kategori Pratama
- 2) 15 kab/Kota mendapatkan penghargaan KLA kategori Madya
- 3) 9 kab/kota mendapatkan penghargaan KLA kategori Nindya
- 4) 1 Kota mendapatkan penghargaan KLA kategori Utama

No	Kabupaten/Kota	Kategori KLA	No	Kabupaten/Kota	Kategori KLA
1	Kabupaten Lumajang	Pratama	20	Kabupaten Madiun	Madya
2	Kabupaten Jember	Madya	21	Kota Madiun	Nindya
3	Kabupaten Nganjuk	Pratama	22	Kabupaten Lamongan	Nindya
4	Kabupaten Sumenep	Pratama	23	Kabupaten Pacitan	Madya
5	Kabupaten Pasuruan	Pratama	24	Kabupaten Mojokerto	Madya
6	Kabupaten Probolinggo	Pratama	25	Kota Mojokerto	Madya
7	Kabupaten Banyuwangi	Pratama	26	Kabupaten Ngawi	Madya
8	Kabupaten Tuban	Madya	27	Kabupaten Magetan	Pratama
9	Kabupaten Situbondo	Madya	28	Kota Pasuruan	Madya
10	Kabupaten Kediri	Pratama	29	Kota Batu	Madya
11	Kabupaten Pamekasan	Pratama	30	Kabupaten Gresik	Madya
12	Kabupaten Malang	Madya	31	Kabupaten Bondowoso	Pratama
13	Kota Malang	Nindya	32	Kabupaten Tulungagung	Nindya
14	Kota Probolinggo	Nindya	33	Kabupaten Sidoarjo	Nindya
15	Kota Kediri	Madya	34	Kabupaten Jombang	Nindya
16	Kabupaten Blitar	Nindya	35	Kota Surabaya	Utama
17	Kota Blitar	Madya	36	Kabupaten Bangkalan	Pratama
18	Kabupaten Bojonegoro	Madya	37	Kabupaten Sampang	Pratama
19	Kabupaten Trenggalek	Nindya	38	Kabupaten Ponorogo	Pratama

Tabel Alokasi Per Sasaran Pembangunan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
1.	Meningkatnya Kualitas Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak	1. Indeks Pengarusutamaan Gender (PUG)	Rp. 5.268.772.205,-	17,66
		2. Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Rp. 3.097.466.124,-	10,38

Upaya pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak didukung oleh

anggaran sebesar Rp. 8.366.238.329,- atau 28,04% dari Belanja Daerah.

Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak	1. Indeks Pengaru sutamaa n Gender (PUG)	0,94	0,97	103,19	5.268.772.205	5.064.431.039	96,12
	2. Indeks Perlindu ngan Anak (IPA)	71,80	72,25*	100,62	3.097.466.124	2.893.280.032	93,40%
Total				203,81			189,52
Rata-Rata				101,90			94,76

Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak didukung oleh 6 Program yaitu :

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
2. Program Perlindungan Perempuan
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
5. Program Pemenuhan Hak Anak
6. Program Perlindungan Khusus Anak

Pada Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak, perbandingan antara capaian kinerja sebesar 101,90% dengan capaian realisasi anggaran sebesar 94,76%, menunjukkan terjadi efisiensi anggaran sebesar 7,14%.

Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kependudukan

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis 2 diukur melalui 1 (satu) indikator, yaitu : Persentase Lembaga yang memanfaatkan Profil Kependudukan Provinsi Jawa Timur.

Tabel Pencapaian Kinerja Tahun 2021

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Persentase Lembaga yang memanfaatkan Profil Kependudukan Provinsi Jawa Timur	100%	100%	100

Capaian Indikator **Persentase Lembaga yang Memanfaatkan Profil Kependudukan Provinsi Jawa Timur** pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 100% dan realisasinya sebesar 100%, tingkat capaian sebesar 100%.

Setiap Tahun, DP3AK Provinsi Jawa Timur menyusun Profil Kependudukan Jawa Timur, dan telah didistribusikan dan dimanfaatkan oleh 54 (lima puluh empat) OPD di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan OPD yang telah memanfaatkan Data Kependudukan Provinsi Jawa Timur ada 11 (sebelas) OPD, dimana 8 (delapan) OPD diantaranya telah mendapat User ID, sedangkan 4 (tiga) OPD masih dalam proses pengajuan persetujuan User ID ke Ditjen Dukcapil untuk mengakses

dan memanfaatkan data kependudukan. Daftar 8 (delapan) OPD yang telah memanfaatkan dan mengakses data kependudukan di tingkat Provinsi dan mendapat User ID, antara lain :

1. Biro Administrasi Kesra.
2. Dinas Kominfo
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
4. RSUD Dr. Saiful Anwar
5. RSUD Soedono Madiun
6. Disnakertans.
7. Dinas Koperasi dan UMKM
8. Bappenda

Sedangkan daftar 3 (tiga) OPD yang sedang dalam proses pengajuan persetujuan User ID ke Ditjen Dukcapil untuk mengakses dan memanfaatkan data kependudukan, antara lain :

1. Pelayanan UPT RS Mata masyarakat (dibawah Dinkes)
2. RSJ Menur
3. Dinas Sosial.

Untuk Kab/Kota yang sudah melakukan Pelayanan On-line se Jawa Timur sebanyak :

- Melalui Whatsapps (WA) : 38 Kab/Kota
- Melalui Website : 22 Kab/Kota
- Melalui Smartphone : 7 Kab/Kota

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	2	3	4		5	6
1.	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Persentase Lembaga yang memanfaatkan Profil Kependudukan Provinsi Jawa Timur	100%	-	100%	100%

Persentase lembaga yang memanfaatkan Profil Kependudukan Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 sebesar 100% sama dengan Tahun 2020 sebesar 100%.

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Akhir Periode RENSTRA

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Persentase Lembaga yang memanfaatkan Profil Kependudukan Provinsi Jawa Timur	100%	100%	100%

Capaian Persentase lembaga yang memanfaatkan Profil Kependudukan Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 sebesar 100%, dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 100%, sudah mencapai target atau tingkat kemajuannya sebesar 100%.

Tabel Alokasi Per Sasaran Pembangunan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
1.	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Persentase Lembaga yang memanfaatkan Profil Kependudukan Provinsi Jawa Timur	Rp. 3.106.062.222,-	10,41

Upaya pencapaian Sasaran Strategis Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Kependudukan didukung oleh anggaran sebesar Rp. 3.106.062.222,- atau 10,41% dari Belanja Daerah.

Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
Sasaran 2 : Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Persentase Lembaga yang memanfaatkan Profil Kependudukan Provinsi Jawa Timur	100%	100%	100%	3.106.062.222	3.099.724.001	99,79%

Pencapaian Sasaran Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Kependudukan didukung oleh 4 (empat) Program yaitu :

4. Program Pendaftaran Penduduk
5. Program Pencatatan Sipil
6. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
7. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Pada Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kependudukan, perbandingan antara capaian kinerja sebesar 100%, dengan capaian realisasi anggaran sebesar 99,79%, menunjukkan adanya efisiensi anggaran sebesar 0,21%.

Sasaran Strategis 3
Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis 3 diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu : Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun.

Tabel Pencapaian Kinerja Tahun 2021

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate / TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	1,91	2,21	84,29

Catatan : *) Realisasi TFR tahun 2021 adalah Data Tahun 2020

Capaian Indikator **Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun** pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 1,91 dan realisasinya sebesar 2,21, tingkat capaian sebesar 84,29%. Total Fertility Rate merupakan jumlah anak rata-rata yang dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas pada

saat TFR dihitung atau rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya.

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	2	3	4		5	6
1.	Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate / TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	1,91	2,22	2,29	2,21

Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun Tahun 2021 sebesar 2,21 lebih rendah 0,08 poin jika dibandingkan dengan Tahun 2020 sebesar 2,29. Indikator ini penting dan strategis untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan suatu negara ataupun seluruh negara dalam mengendalikan jumlah penduduknya melalui program Keluarga Berencana. Dalam hal ini, TFR sebesar 2,1 merupakan angka standar capaian ideal bagi seluruh negara (penduduk tumbuh seimbang). Dengan TFR 2,1 maka 2 orang anak yang dilahirkan hanya akan menggantikan kedua orang tuanya.

Salah satu penyebab Kenaikan TFR jika dibandingkan tahun 2019 Situasi pandemi covid-19 membuat pasangan usia subur mengalami keterbatasan akses ke fasilitas Kesehatan. Keterbatasan tersebut dapat berasal dari kekhawatiran akan tertular covid-19 maupun jadwal pelayanan KB yang ada di faskes tidak sesering pada saat sebelum

pandemi. Hal ini berakibat pada menurunnya kunjungan pasangan usia subur ke faskes untuk mendapatkan pelayanan KB. Keterbatasan akses tersebut terjadi pada semua metode pelayanan, sehingga berdampak pada naiknya TFR yang sudah diprediksi sejak awal pandemi.

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Standar Nasional

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Realisasi Provinsi Jawa Timur	Realisasi Nasional	Ket (+/-)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate / TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	2,29	2,45	+ 0,16

Pada Tahun 2020, Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun Provinsi Jawa Timur sebesar 2,29 lebih rendah 0,16 poin dari angka Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun Nasional sebesar 2,45. Indikator TFR adalah indikator dengan tingkat realisasi negatif, sehingga setiap tahun diharapkan realisasinya semakin kecil. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun Provinsi Jawa Timur lebih baik jika dibandingkan dengan nasional.

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Akhir Periode RENSTRA

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate / TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	1,83	2,21	79,23%

Capaian Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun pada tahun 2021 sebesar 2,21, dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 1,83, sudah mencapai target atau tingkat kemajuannya sebesar 79,23%.

Tabel Alokasi Per Sasaran Pembangunan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
1.	Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate / TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Rp. 1.023.231.025,-	3,43

Upaya pencapaian Sasaran Strategis Meningkatkan Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga didukung oleh anggaran sebesar Rp. 1.023.231.025,- atau 3,43% dari Belanja Daerah.

Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
Sasaran 3 : Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate / TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	1,91	2,21	84,29 %	1.023.231.025	1.009.659.950	98,67%

Pada Sasaran Meningkatkan Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga, perbandingan antara capaian kinerja sebesar 84,29% dengan capaian realisasi anggaran sebesar 98,67%, menunjukkan adanya inefisiensi anggaran sebesar 14,38%.

Pencapaian Sasaran Meningkatkan Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga didukung oleh 3 Program yaitu :

1. Program Pengendalian Penduduk
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
3. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Sasaran Strategis 4 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis 4 diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu : Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP.

Tabel Pencapaian Kinerja Tahun 2021

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	82,23	82,16	99,91

Capaian Indikator Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 82,23 dan realisasinya sebesar 82,16, tingkat capaian sebesar 99,91%. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa DP3AK Provinsi Jawa Timur memperoleh nilai **82,16** atau predikat **A**. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya memadai, serta kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Capaian indikator ini dipengaruhi oleh 5 komponen, yaitu :

1. Perencanaan Kinerja
2. Pengukuran Kinerja
3. Pelaporan Kinerja
4. Evaluasi Kinerja

5. Pencapaian Kinerja

Capaian Indikator Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP tahun 2021 ditargetkan sebesar 82,23 dan realisasinya sebesar 82,16, tingkat capaian sebesar 99,91%.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	82,23	81,30	82,15	82,16

Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2021 sebesar 82,16, lebih tinggi 0,01 poin dari tahun 2020 sebesar 82,15. Peningkatan capaian ini dipengaruhi oleh peningkatan pada komponen Pencapaian Kinerja dimana pada tahun 2021 sebesar 17,25 meningkat 2,87 poin jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 14,38.

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Akhir Periode RENSTRA

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	82,47	82,16	99,62%

Capaian Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP tahun 2021 sebesar 82,16 dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 82,47, belum mencapai target atau tingkat kemajuannya sebesar 99,62%.

Tabel Alokasi Per Sasaran Pembangunan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	Rp. 17.333.754.113,-	58,10

Upaya pencapaian Sasaran Strategis Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja didukung oleh anggaran sebesar Rp. 17.333.754.113,- atau 58,10% dari Belanja Daerah.

Tabel Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran/ Program	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
Sasaran 4 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	82,23	82,16	99,91	17.333.754.113	16.289.555.382	93,98

Pencapaian Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah didukung oleh 1 (satu) Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi.

Pada Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, perbandingan antara rata-rata capaian kinerja sebesar 99,91%

dengan capaian realisasi anggaran sebesar 93,98%, menunjukkan adanya efisiensi anggaran sebesar 5,93%.

B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi keuangan secara umum pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	BELANJA DAERAH	29.829.285.689,-	28.356.650.404,00	95,06%
I	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	2.660.286.705,-	2.638.424.524,00	99,18%
1.	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	1.079.531.478,-	1.078.040.350,00	99,86%
1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	532.849.890,-	532.493.900,00	99,93%
1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	206.382.588,-	205.936.850,00	99,78%
1.3	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	173.590.000,-	173.376.150,00	99,88%
1.4	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	166.709.000,-	166.233.450,00	99,71%
2.	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	1.540.330.227,-	1.520.789.174,00	98,73%
2.1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang POlitik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	626.680.600,-	618.244.037,00	98,65%
2.2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Soasial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	913.649.627,-	902.545.137,00	98,78%

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
3.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	40.425.000,-	39.595.000,00	97,95%
3.1	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	40.425.000,-	39.595.000,00	97,95%
II	Program Perlindungan Perempuan	2.062.611.500,-	1.882.885.235,00	91,29%
4.	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten / Kota	279.081.000,-	276.645.570,00	99,13%
4.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	212.981.000,-	211.747.770,00	99,42%
4.2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	66.100.000,-	64.897.800,00	98,18%
5.	Penyedia Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten / Kota	1.334.280.500,-	1.173.127.800,00	87,92%
5.1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten / Kota	1.105.875.000,-	1.105.875.000,00	100,00%
5.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyedia Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	228.405.500,-	67.252.800,00	29,44%
6.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	449.250.000,-	433.111.865,00	96,41%
6.1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penangan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	282.700.000,-	272.276.665,00	96,31%

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
6.2	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten / Kota	166.550.000,-	160.835.200,00	96,57%
III	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	28.842.000,-	28.657.500,00	99,36%
7.	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	28.842.000,-	28.657.500,00	99,36%
7.1	Pelaksanaan KOMunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	28.842.000,-	28.657.500,00	99,36%
IV	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	517.032.000,-	514.463.780,00	99,50%
8.	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan di Tingkat Daerah Provinsi	517.032.000,-	514.463.780,00	99,50%
8.1	Penyedia Data Gender dan Anak Provinsi	115.760.000,-	115.390.000,00	99,68%
8.2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	401.272.000,-	399.073.780,00	99,45%
V	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	1.701.923.693,-	1.654.730.393,00	97,23%
9.	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	904.793.412,-	888.809.940,00	98,23%
9.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan dan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	720.281.524,-	716.144.290,00	99,43%
9.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	184.511.888,-	172.665.650,00	93,58%
10.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	797.130.281,-	765.920.453,00	96,08%

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
10.1	Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	351.936.363,-	329.403.528,00	93,60%
10.2	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	445.193.918,-	436.516.925,00	98,05%
VI	Program Perlindungan Khusus Anak	1.395.542.431,-	1.238.549.639,00	88,75%
11.	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten / Kota	479.751.931,-	469.959.804,00	97,96%
11.1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	251.039.931,-	242.591.650,00	96,63%
11.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	228.712.000,-	227.368.154,00	99,41%
12.	Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah	612.085.500,-	472.975.885,00	77,27%
12.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan dan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	228.405.500,-	93.676.305,00	41,01%
12.2	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	383.680.000,-	379.299.580,00	98,86%
13.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten / Kota	303.705.000,-	295.613.950,00	97,34%
13.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia	303.705.000,-	295.613.950,00	97,34%

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi			
VII	Program Pendaftaran Penduduk	944.950.500,-	943.198.328,00	99,81%
14.	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	488.618.000,-	487.296.889,00	99,73%
14.1	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	98.756.000,-	98.756.000,00	100,00%
14.2	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	273.042.000,-	271.849.576,00	99,56%
14.3	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	116.820.000,-	116.691.313,00	99,89%
15.	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	456.332.500,-	455.901.439,00	99,91%
15.1	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Kependudukan	265.215.000,-	265.068.100,00	99,94%
15.2	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	191.117.500,-	190.833.339,-	99,85%
VIII	Program Pencatatan Sipil	851.907.500,-	849.230.051,00	99,69%
16.	Pelayanan Pencatatan Sipil	213.370.000,-	211.712.400,00	99,22%
16.1	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	213.370.000,-	211.712.400,00	99,22%
17.	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	638.537.500,-	637.517.651,00	99,84%
17.1	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	132.150.000,-	131.923.000,00	99,83%
17.2	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	506.387.500,-	505.594.651,00	99,84%
IX	Program Pengelolaan Informasi Administrasi	1.061.017.500,-	1.059.493.500,00	99,86%

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	Kependudukan			
18.	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	238.360.000,-	238.305.100,00	99,98%
18.1	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	103.940.000,-	103.940.000,00	100,00%
18.2	Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten / Kota	134.420.000,-	134.365.100,00	99,96%
19.	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	521.408.000,-	520.901.300,00	99,00%
19.1	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	216.350.000,-	216.235.000,00	99,95%
19.2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	305.058.000,-	304.666.300,00	99,87%
20.	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	301.249.500,-	300.287.100,-	99,68%
20.1	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Kependudukan	301.249.500,-	300.287.100,00	99,68%
X	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	248.186.722,-	247.802.122,00	99,85%
21.	Penyediaan Profil Kependudukan	248.186.722,-	247.802.122,00	99,85%
21.1	Penyedia Data Kependudukan Provinsi	97.445.500,-	97.445.500,00	100,00%
21.2	Penyusun Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan yang lain	150.741.222,-	150.356.622,00	99,74%

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
XI	Program Pengendalian Penduduk	499.000.000,-	486.031.00,00	97,40%
22.	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	499.000.000,-	486.031.000,00	97,40%
22.1	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	31.100.000,-	30.992.650,00	99,65%
22.2	Advokasi dan Sosialisasi GDPK	467.900.000,-	455.038.350,00	97,25%
XII	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	200.500.000,-	200.160.850,00	99,83%
23.	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	200.500.000,-	200.160.850,00	99,83%
23.1	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	200.500.000,-	200.160.850,00	99,83%
XIII	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	323.731.025,-	323.468.100,00	99,92%
24.	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	323.731.025,-	323.468.100,00	99,92%
24.1	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan	323.731.025,-	323.468.100,00	99,92%

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga			
XIV	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	17.333.154.113,-	16.289.555.382,00	93,98%
25.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	348.129.115,-	347.174.640,00	99,73%
25.1	Penyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	297.464.000,-	297.300.140,00	99,94%
25.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	3.772.000,-	3.535.000,00	93,72%
25.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	3.580.000,-	3.578.250,00	99,95%
25.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	3.580.000,-	3.570.000,00	99,72%
25.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	5.813.115,-	5.727.250,00	98,52%
25.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30.108.000,-	29.660.000,00	98,51%
25.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.812.000,-	3.804.000,00	99,79%
26.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.495.757.036,-	13.577.432.670,00	93,66%
26.1	Penyedia Gaji dan Tunjangan ASN	13.779.327.000,-	12.873.970.435,00	93,43%
26.2	Penyedia Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	497.293.000,-	484.705.000,00	97,47%
26.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	187.482.036,-	187.152.085,00	99,82%
26.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	9.935.000,-	9.935.000,00	100,00%
26.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.280.000,-	5.230.150,00	99,06%

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
26.6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	4.860.000,-	4.860.000,00	100,00%
26.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	9.500.000,-	9.500.000,00	100,00%
26.8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.080.000,-	2.080.000,00	100,00%
27.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	257.015.000,-	246.195.200,00	95,79%
27.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	47.300.000,-	47.300.000,00	100,00%
27.2	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	33.600.000,-	33.600.000,00	100,00%
27.3	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	176.115.000,-	165.295.200,00	93,86%
28.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	701.958.148,-	679.511.784,00	96,80%
28.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	19.997.842,-	19.849.500,00	99,26%
28.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	302.739.172,-	292.343.450,00	96,57%
28.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.331.416,-	1.328.000,00	99,74%
28.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	88.826.956,-	88.573.700,00	99,71%
28.5	Penyediaan Bahan/ Material	6.060.696,-	6.016.680,00	99,27%
28.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.386.066,-	9.581.600,00	77,36%
28.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	270.616.000,-	261.818.854,00	96,75%
29.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	950.084.060,-	864.322.013,00	90,97%
29.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	388.211.898,-	303.078.891,00	78,07%
29.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	561.872.162,-	561.243.122,00	99,89%
30.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	564.310.754,-	558.419.075,00	98,96%

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	Pemerintahan Daerah			
30.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.997.000,-	96.438.900,00	95,49%
30.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.558.700,-	100.350.500,00	99,79%
30.3	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	5.000.000,-	4.950.000,00	99,00%
30.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	331.658.500,-	330.597.795,-	99,68%
30.5	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Saranan dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	26.096.554,-	26.081.880,00	99,94%
31.	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	16.500.000,-	16.500.000,00	100,00%
31.1	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	16.500.000,-	16.500.00,00	100,00%
JUMLAH BELANJA DAERAH		29.829.285.689,-	28.356.650.404,-	95,06%

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2021 mendapatkan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK-NF), dengan Pagu sebesar Rp. 29.829.285.689,-, terealisasi sebesar Rp. 28.356.650.404,- atau 95,06%.

C. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI

Adapun tindak lanjut yang akan dilakukan oleh DP3AK Provinsi Jawa Timur dari hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah DP3AK yang dilakukan oleh Tim Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah di

lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kembali komitmen pimpinan sebagai penggerak implementasi akuntabilitas kinerja;
2. Melakukan pemetaan kembali atas ukuran kinerja yang digunakan sehingga ukuran kinerja dapat menggambarkan output dan outcome dengan baik dan sesuai dengan kewenangan pada masing-masing level, yang ditindaklanjuti dengan Penysunan Perubahan Renstra Tahun 2019-2024;
3. Menyusun Cascading Kinerja dan menjaga keselarasan antara IKU sampai dengan IKI serta menyusun penganggaran berbasis kinerja;
4. Menyelaraskan cascading kinerja dengan peta proses bisnis;
5. Monitoring dan evaluasi atas Realisasi Perjanjian Kinerja yang disusun;
6. Pengembangan SDM yang menangani akuntabilitas kinerja baik secara kualitas maupun kuantitas.

BAB IV

PENUTUP

Pada Renstra Tahun 2019-2024, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur telah menetapkan 1 (satu) tujuan dan 4 (empat) sasaran yang akan dicapai. Keempat sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 5 (lima) indikator kinerja. Realisasi pada akhir tahun menunjukkan bahwa 4 (empat) sasaran dapat dicapai dengan hasil baik.

Berdasarkan uraian capaian kinerja dari Indikator Kinerja Sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024, dapat diuraikan sebagai berikut :

SASARAN 1 : Meningkatnya Kualitas kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak mendapat predikat nilai **Sangat Baik**, dengan rata-rata capaian sebesar **101,90%**. Hal ini terbukti dari hasil pengukuran 2 (dua) Indikator Sasaran.

SASARAN 2 : Meningkatnya Pengelolaan administrasi kependudukan mendapat predikat nilai **Baik**, dengan capaian sebesar **100%**. Hal ini terbukti dari hasil pengukuran 1 (satu) Indikator Sasaran.

SASARAN 3 : Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga dengan kategori nilai **Baik**,

dengan capaian sebesar **84,29%**. Hal ini terbukti dari hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran.

SASARAN 4 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan kategori nilai **Baik**, dengan capaian sebesar **99,91%**. Hal ini terbukti dari hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran.

Untuk meningkatkan capaian kinerja organisasi di masa mendatang, DP3AK Provinsi Jawa Timur akan melakukan langkah-langkah optimalisasi, melalui :

1. Optimalisasi fungsi koordinasi dan fasilitasi melalui pertemuan, rapat rutin, pelatihan dan pendampingan kepada pengambil keputusan dan para tim pokja PUG dan focal poin PD terutama dalam menyusun ARG dan membuat inovasi pembangunan responsif gender.
2. Pertemuan refreshing persamaan persepsi bagi fasilitator PPRG Daerah dan fasilitator PPRG Provinsi. Pada tahun 2022 dilakukan pendampingan pengembangan DRPPA dan PPRG Desa di beberapa daerah. Memfasilitasi pertemuan data terpilah untuk perangkat daerah tentang pentingnya data terpilah sebagai salah satu unsur untuk mengambil kebijakan
3. Melakukan advokasi langsung kepada Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan Media Massa untuk pemahaman terkait PUG.
4. Memfasilitasi pertemuan data terpilah untuk perangkat daerah tentang pentingnya data terpilah sebagai salah satu unsur untuk mengambil kebijakan.

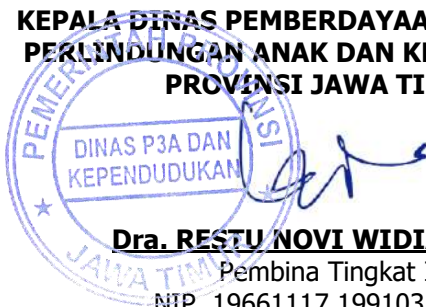
5. Advokasi dan pendampingan kepada Gugus Tugas KLA Kab/Kota untuk tetap berkomitmen dan menyiapkan seluruh Dokumen kelengkapan dalam rangka Verifikasi Lapangan Evaluasi KLA.
6. Mengadakan Peningkatan Kapasitas SDM bagi Forum Anak dan Fasilitator melalui Bimtek tentang KHA.
7. Melaksanakan Sosialisasi kepada para APH dan Dinas serta Lembaga Layanan Korban terkait Implementasi dari UU Sistem Peradilan Pidana Anak.
8. Advokasi dan pendampingan ke Kab/Kota untuk membentuk PATBM.
9. Optimalisasi dan evaluasi penggunaan aplikasi Gender dan Anak, sehingga dapat menghasilkan Data terpilah Gender dan Anak.
10. Mengadakan pelatihan ketrampilan dan pemahaman tentang IT (Pemberdayaan Perempuan) kepada Anggota IR (Industri Rumahan) dan PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga) dan Perempuan Korban Kekerasan di Kabupaten/Kota.
11. Memberikan Pemahaman dalam bidang Politik, Sosial dan budaya kepada Organisasi dan Forum Perempuan yang ada di Jawa Timur.
12. Melakukan advokasi/pendampingan kepada P2TP2A Kab/Kota dalam rangka penguatan kelembagaan dan peningkatan SDM pengelola P2TP2A dalam rangka layanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
13. Mendorong Kabupaten/Kota untuk segera membentuk UPTD PPA sebagaimana yang diamanatkan dalam Permen PP PA No. 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA.

14. Meningkatkan koordinasi antar lintas sektor, sehingga memudahkan dalam pengendalian kegiatan terkait pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
15. Melakukan Sosialisasi secara terus menerus terhadap Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah agar memanfaatkan Data Kependudukan sebagai basis data utama.
16. Meningkatkan penggunaan Teknologi Informasi dalam mendukung kegiatan pelaporan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
17. Mendorong dan mengadvokasi Kab/Kota untuk melaksanakan Percepatan terhadap Program Kegiatan KKBPK.
18. Meningkatkan media promosi dan KIE program KKBPK sesuai kearifan budaya lokal.
19. Peningkatan kapasitas mitra dan organisasi kemasyarakatan dilakukan secara virtual melalui zoom meeting media sosial dan kegiatan lain yang menunjang.
20. Perlu adanya inovasi dalam bentuk pembinaan, pemantauan dan evaluasi program.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 yang dapat kami sajikan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi serta kinerja yang telah dicapai berdasarkan kewenangan yang diberikan yang sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 17 Januari 2022

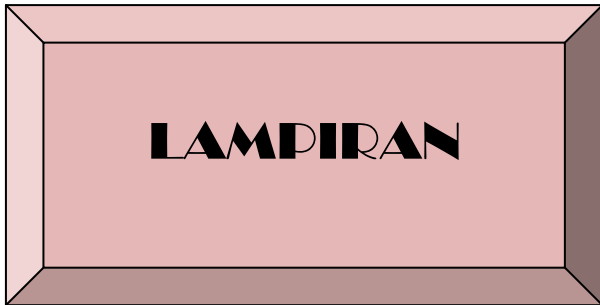
**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KEPENDUDUKAN
PROVINSI JAWA TIMUR**



Dra. RESTU NOVI WIDIANI, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19661117 199103 2 008




LAMPIRAN

i. FORM PENDANAAN INDIKATIF PADA RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2019-2024

- TUJUAN** : Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan
- TUGAS** : Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta tugas pembantuan
- FUNGSI** :
1. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
 4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya

TUJUAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	REALISASI		TARGET KINERJA			
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	<p>IDG merupakan indikator komposit untuk melihat peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG difokiskan pada partisipasi untuk mengukur ketimpangan gender pada bidang-bidang kunci dalam partisipasi ekonomi dan politik.</p> <p>$1/3 (Ipar + IDM + Iinc-dist)$</p> <p>Ipar = Indeks Keterwakilan di parlemen IDM = Indeks pengambilan keputusan Iinc-dis = Indeks distribusi pendapatan</p>	73,04	73,03	70,97	71,37	71,77	72,17

SASARAN		DEFINISI OPEASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN	REALISASI		TARGET KINERJA				PROGRAM	PAGU INDIKATIF RENSTRA				
URAIAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		2019	2020	2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024	
Meningkatnya kualitas kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pengarusutamaan Gender	Indeks Pengarusutamaan Gender dihitung berdasarkan pencapaian terhadap 7 Prasyarat Gender	-	0,93	0,94	0,95	0,96	0,97	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	4.100.712.920	2.614.750.000	2.614.750.000	2.614.750.000	
									Program Perlindungan Perempuan	1.994.205.500	487.000.000	487.000.000	487.000.000	
										Program Peningkatan Kualitas Keluarga	108.629.000	125.250.000	125.250.000	125.250.000
										Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	606.804.000	320.000.000	320.000.000	320.000.000
	Indeks Perlindungan Anak	IPA merupakan presentasi dari capaian pembangunan perlindungan anak Indonesia yang memuat Klaster I-V, yaitu : - Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan - Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif - Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan - Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya - Klaster V Perlindungan Khusus	71,80	72,25	71,80	71,80	71,85	71,90	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	1.662.588.709	1.180.000.000	1.180.000.000	1.180.000.000	

SASARAN		DEFINISI OPEASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN	REALISASI		TARGET KINERJA				PROGRAM	PAGU INDIKATIF RENSTRA			
URAIAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		2019	2020	2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024
		$IPA = \sum_{j=1}^k (W_j \times Indeks K_j)$  <p> <small> Indeks = $\frac{Nilai \text{ K}_j - \text{Nilai Min}}{\text{Nilai Maks} - \text{Nilai Min}} \times 100$ Indeks = $\frac{25 - 0}{100 - 0} \times 100$ Indeks = $\frac{25}{100} \times 100$ Indeks = 25 Keterangan: K_j = nilai Indeks Kriteria ke-j yang telah dinormalisasi ke dalam skala indeks 0-100. </small> </p>											
									Program Perlindungan Khusus Anak	1.098.535.431	689.000.000	689.000.000	689.000.000
Meningkatnya pengelolaan administrasi kependudukan	Persentase lembaga yang memanfaatkan Profil Kependudukan Provinsi Jawa Timur	Jumlah PD Prov Jatim yang memanfaatkan Profil Kependudukan Prov Jatim $\frac{\text{Jumlah PD Prov Jatim}}{\text{Jumlah PD Prov Jatim}} \times 100\%$		100%	100%	100%	100%	100%	Program Pendaftaran Penduduk	977.600.991	510.000.000	510.000.000	510.000.000
									Program Pencatatan sipil	851.907.500	0	0	0
									Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1.156.457.734	510.000.000	510.000.000	510.000.000
									Program Pengelolaan profil Kependudukan	420.629.555	420.000.000	420.000.000	420.000.000
Meningkatnya pengendalian penduduk dan Kesejahteraan Keluarga	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15- 49 Tahun	Angka Kelahiran Total (TFR) adalah Rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia subur. Sebagai indikator untuk membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan	2,28	2,29	1,91	1,89	1,86	1,83	Program Pengendalian Penduduk	642.020.000	639.105.000	639.105.000	639.105.000

SASARAN		DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN	REALISASI		TARGET KINERJA				PROGRAM	PAGU INDIKATIF RENSTRA			
URAIAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		2019	2020	2021	2022	2023	2024		2021	2022	2023	2024
		<p>program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran</p> $TFR = \sum_{i=15}^{45} ASFR_i$ <p>ASFR_i = ASFR untuk wanita pada kelompok usia ke-i i = kelompok usia 15-19, 20-24, ..., 45-49</p>											
									Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	302.303.245	310.895.000	310.895.000	310.895.000
									Program Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (KS)	497.636.490	500.000.000	500.000.000	500.000.000
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	<p>Evaluasi implementasi SAKIP adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.</p> <p>Capaian indikator ini dipengaruhi oleh 5 komponen, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Kinerja 2. Pengukuran Kinerja 3. Pelaporan Kinerja 4. Evaluasi Kinerja 5. Pencapaian Kinerja 	81,30	82,15	82,23	82,31	82,39	82,47	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	30.680.717.485	27.852.482.000	28.423.889.000	28.828.582.000

ii. PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI JAWA TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. RESTU NOVI WIDIANI, MM

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Jabatan : Gubernur Jawa Timur

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Surabaya, November 2021

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KEPENDUDUKAN
PROVINSI JAWA TIMUR

Dra. RESTU NOVI WIDIANI, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19661117 199103 2 008



Pihak Kedua,
GUBERNUR JAWA TIMUR

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN KEPENDUDUKAN
PROVINSI JAWA TIMUR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak	1 Indeks Pengarusutamaan Gender	0,94
		2 Indeks Perlindungan Anak (IPA)	71,80
2	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kependudukan	1 Persentase Lembaga yang memanfaatkan Profil Kependudukan Provinsi Jawa Timur	100%
3	Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga	1 Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	1,91
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1 Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	82,23

	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 17.333.754.113,-	APBD
2	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp 2.660.286.705,-	APBD
3	Program Perlindungan Perempuan	Rp 1.775.121.000,-	APBD
		Rp. 287.490.500,-	DAK Non Fisik
4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp 28.842.000,-	APBD
5	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp 1.701.923.693,-	APBD
6	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Rp 517.032.000,-	APBD
7	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp 1.085.506.931,-	APBD
		Rp 310.035.500,-	DAK Non Fisik
8	Program Pendaftaran Penduduk	Rp 371.798.000,-	APBD
		Rp. 573.152.500,-	DAK Non Fisik

9	Program Pencatatan Sipil	Rp	851.907.500,-	DAK Non Fisik
10	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp	405.189.500,-	APBD
		Rp	655.828.000,-	DAK Non Fisik
11	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp	248.186.722,-	APBD
12	Program Pengendalian Penduduk	Rp	499.000.000,-	APBD
13	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp	200.500.000,-	APBD
14	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp	323.731.025,-	APBD
Jumlah		Rp	29.829.285.689,-	


Surabaya, November 2021

Pihak Kedua
GUBERNUR JAWA TIMUR



KHOFIFAH INDR PARAWANSA

Pihak Pertama
**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
 PERLINDUNGAN ANAK DAN KEPENDUDUKAN
 PROVINSI JAWA TIMUR**



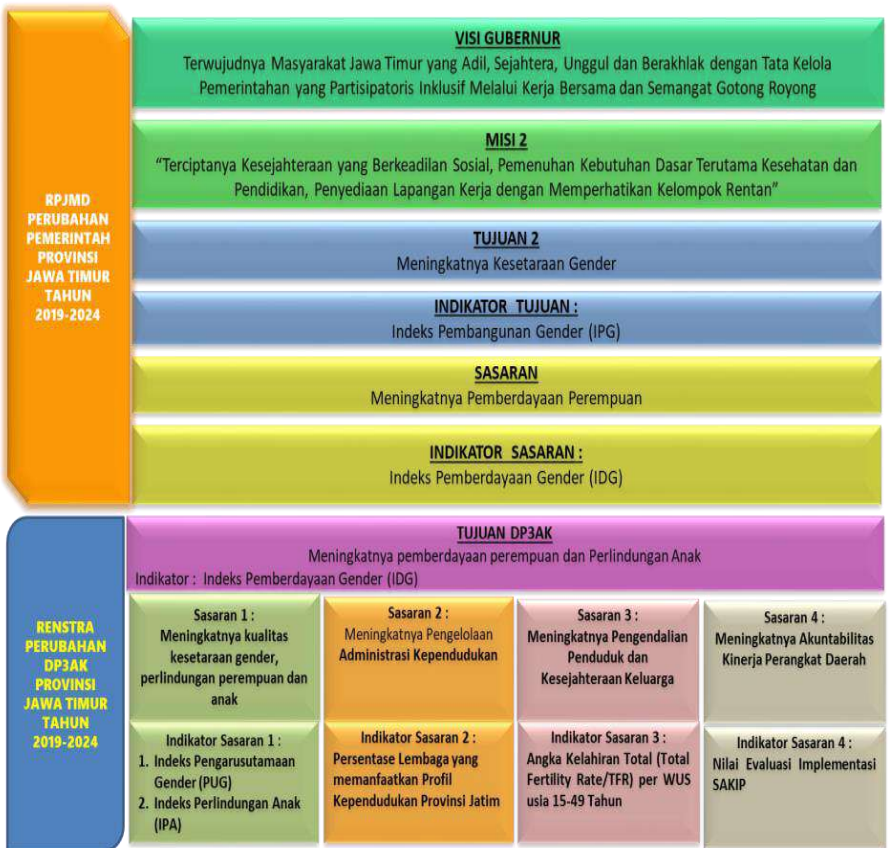
Dra. RESTU NOVI WIDIANI, MM
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19661117 199103 2 008

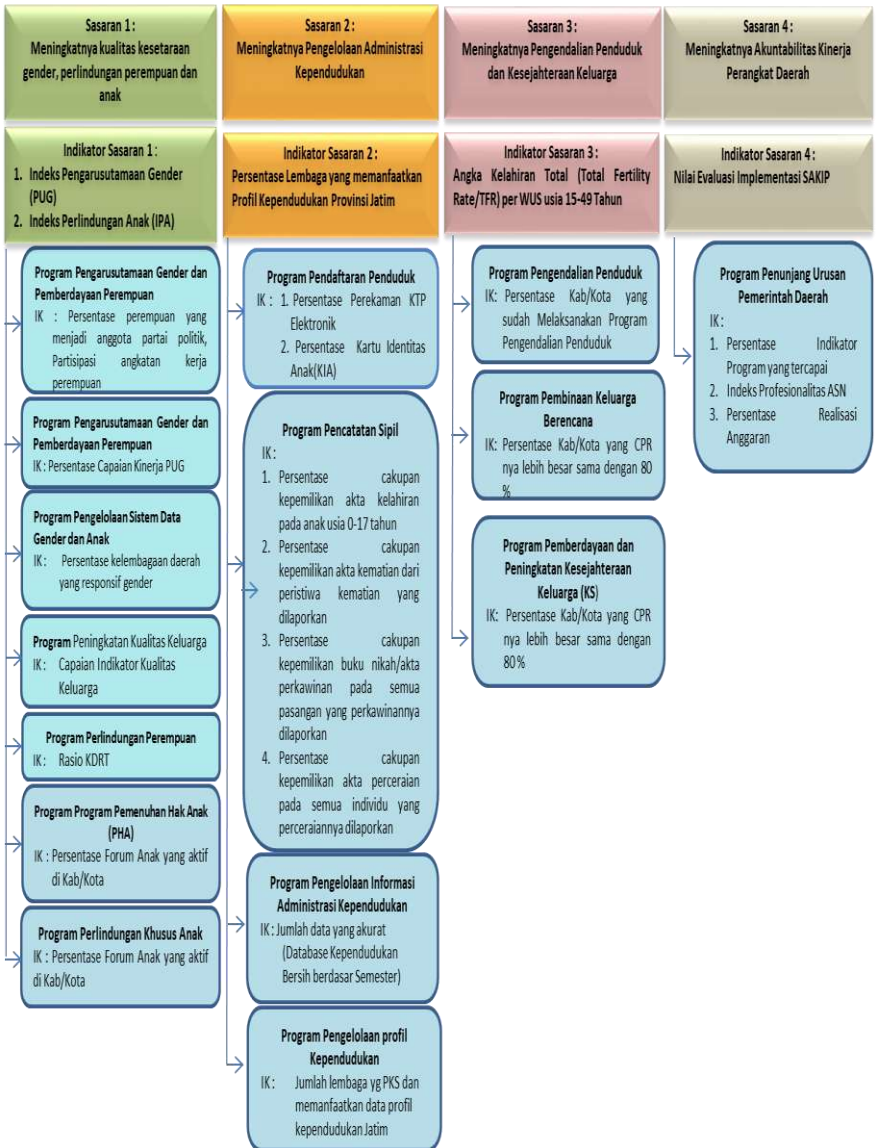
iii. REKAPITULASI DATA

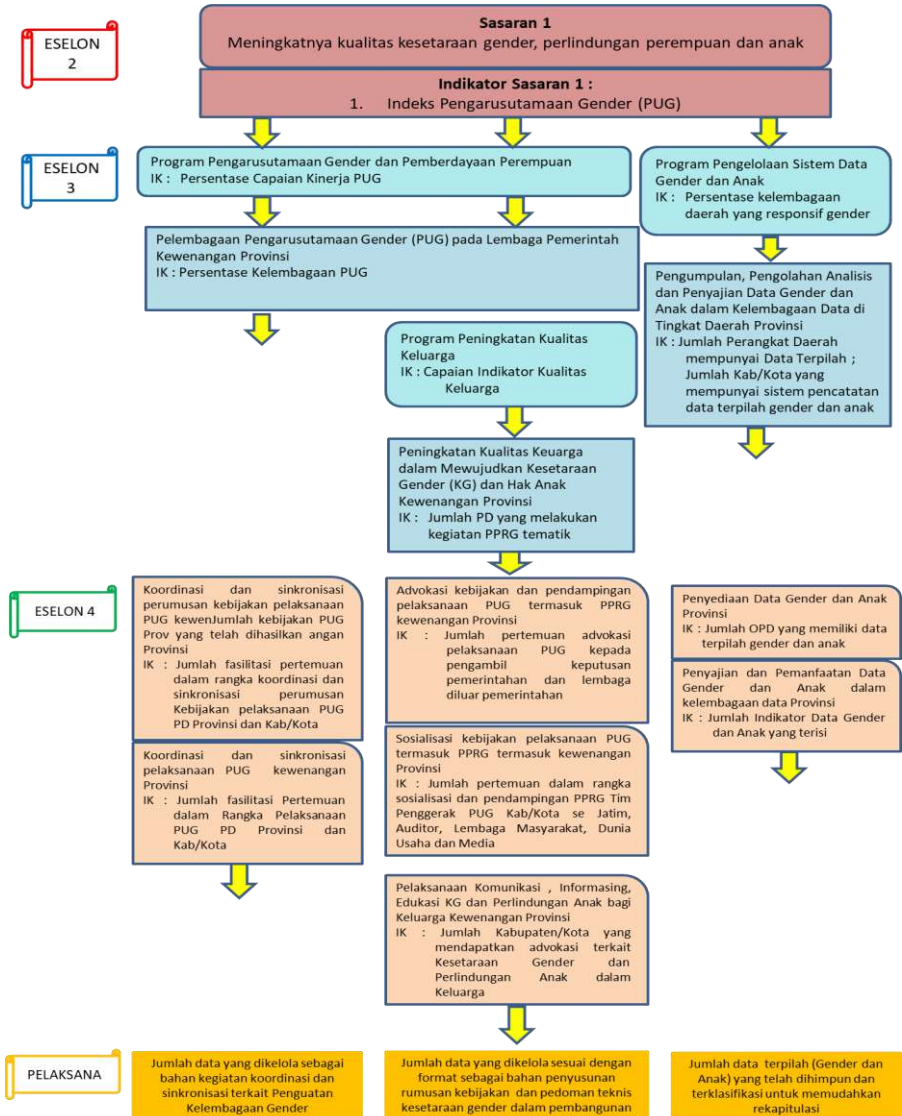
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI JAWA TIMUR

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021	Realisasi			Capaian Tahun 2021
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6		7
I	Tujuan: Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70,97	73,04	73,03	73,03*	102,90%
1	Meningkatnya kualitas kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak	Indek Pengarusutamaan Gender (PUG)	0,94	-	0,94	0,97	103,19%
		Indek Perlindungan Anak (IPA)	71,80	71,80	72,25	72,25*	100,62%
2	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kependudukan	Persentase Lembaga yang memanfaatkan Profil Kependudukan Provinsi Jawa Timur	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	1,91	2,22	2,29	2,21	84,29%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	82,23	81,30	82,15	82,16	99,91%

iv. CASCADING KINERJA (KETERHUBUNGAN DENGAN RPJMD 2019-2024)







ESELON 2

Sasaran 1
Meningkatnya kualitas kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak

Indikator Sasaran 1 :
1. Indeks Pengarusutamaan Gender (PUG)

ESELON 3

Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
IK : Persentase perempuan yang menjadi anggota partai politik

Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
IK : Partisipasi angkatan kerja perempuan

Program Perlindungan Perempuan
IK : Rasio KDRT

Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi
IK : Jumlah kader politik yang mengikuti pembinaan pengambilan keputusan

Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Provinsi
IK : Jumlah peserta pertemuan penguatan kapasitas perempuan dalam membentuk keluarga sejahtera

Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
IK : Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu

Penguatan & pengembangan penyedia lay pemberdayaan perempuan keewangan provinsi
IK : Jumlah Kader Politik yang mengikuti pembinaan pengambilan keputusan; Jumlah peserta pertemuan penguatan kapasitas perempuan dalam membentuk keluarga sejahtera

ESELON 4

Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
IK : Jumlah kader politik yang mengikuti pembinaan pengambilan keputusan

Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
IK : Jumlah peserta pertemuan penguatan kapasitas perempuan dalam membentuk keluarga; Jumlah peserta yang mengikuti Sosialisasi Peningkatan partisipasi Perempuan di Bidang Ekonomi sejahtera; Jumlah peserta kegiatan pengembangan aplikasi pemberdayaan dan perlindungan perempuan yang dikembangkan

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi
IK : jumlah peserta kegiatan mekanisme pelaporan dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
IK : Jumlah senat mahasiswa perempuan yang memahami peran perempuan di bidang politik;

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
IK : Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan partisipasi perempuan di bidang ekonomi; Jumlah peserta yang mengikuti peningkatan SDM bagi anggota forum pusa Kab/Kota ; Jumlah perempuan yang mengikuti kegiatan peningkatan partisipasi perempuan bidang ekonomi dan lingkungan; Jumlah aplikasi pemberdayaan dan perlindungan perempuan yang dikembangkan

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
IK : Jumlah dokumen kebijakan

Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
IK : Jumlah Dokumen Juknis PUSPA; Brosur/leaflet tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan; Jumlah Dokumen Buku Panduan 'SEKOPER'; Buku saku Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan; Buku Kumpulan Peraturan tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

PELAKSANA

Jumlah data pemberdayaan perempuan bidang politik, sosial, budaya yang dikelola

Jumlah data yg disajikan sebagai bahan informasi dan publikasi terkait penguatan ekonomi perempuan

Jumlah data yang diinventarisir sebagai data base hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perlindungan perempuan

ESELON 2

Sasaran 1
Meningkatnya kualitas kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak

Indikator Sasaran 1 :
1. Indeks Perlindungan Anak (IPA)

ESELON 3

Program Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
IK : Persentase Forum Anak yang aktif di Kab/Kota

Program Perlindungan Khusus Anak
IK : Persentase Forum Anak yang aktif di Kab/Kota

Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
IK : Jumlah Perangkat Daerah Provinsi yang mempunyai kegiatan terkait kegiatan KLA; Jumlah Kab/Kota yang sudah mempunyai SK Gugus Tugas KLA dan RAD KLA

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
IK : Cakupan Kab/Kota yang membentuk Forum Anak

Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
IK : Cakupan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan oleh Petugas terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu

ESELON 4

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
IK: Jumlah fasilitasi kegiatan pada Kluster III dan IV

Penyediaan layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
IK : Jumlah Peserta Peringatan Hari Anak nasional Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi
IK : Jumlah peserta Advokasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA); Jumlah Peserta Advokasi Sistem Perlindungan Anak

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi
IK : Jumlah Kabupaten/Kota yang didampingi pada Penilaian Verifikasi Lapangan Evaluasi KLA; Jumlah Peserta Pertemuan Koordinasi Pendampingan Persiapan Verifikasi Lapangan Evaluasi KLA Kabupaten/Kota; Jumlah Peserta Rapat Koordinasi Gugus Tugas KLA Tingkat Provinsi

Pengembangan Komunikasi Informasi Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi
IK : Jumlah peserta pertemuan Forum Anak Daerah se Jawa Timur; Jumlah peserta Bimtek Pelatihan fasilitator Anak Kabupaten/Kota se Jawa Timur

Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi
IK : Jumlah peserta rapat pembahasan petunjuk teknis perlindungan anak, Jumlah peserta penguatan kapasitas jejaring perlindungan anak

PELAKSANA

Jumlah data peraturan/kebijakan terkait pemenuhan hak anak yang dihimpun dan direkap

Jumlah data tumbuh kembang anak sebagai dasar pelaksanaan tugas yang telah dihimpun dan diklasifikasi

Jumlah data anak yang mengalami korban kekerasan yang dihimpun dan diolah

ESELON 2

Sasaran 2
Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Kependudukan

Indikator Sasaran 2 :
Persentase Lembaga yang memanfaatkan Profil Kependudukan Provinsi Jawa Timur

ESELON 3

Program Pendaftaran Penduduk
IK : 1. Persentase Perekaman KTP Elektronik
2. Persentase Kartu Identitas Anak(KIA)

Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
IK : Jumlah data yang akurat (Database Kependudukan Bersih berdasar Semester)

Program Pengelolaan profil Kependudukan
IK : Jumlah lembaga yg PKS dan memanfaatkan data profil kependudukan Jatim

Pelayanan Pendaftaran Kependudukan
IK : Jumlah Kab/Kota yang mengirimkan Laporan Data Kependudukan sesuai standar dan tepat waktu; Jumlah kab/kota yang melaporkan anak yang mendapatkan akte kelahiran

Penataan pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan
IK : Jumlah Kab/Kota yang Pelayanan Adminduknya terkonsolidasi dan terintegrasi Big Database berbasis Perunggalan NIK sesuai Standar

Penyediaan profil Kependudukan
IK : Profil Kependudukan Prov. Jatim yg valid dan update

Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan
IK : Kepemilikan Dokumen Kependudukan KTP

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan
IK : Jumlah kab/kota yang melaporkan anak yang mendapatkan akte kelahiran

Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi
IK : Jumlah Kab/Kota yang sudah mendapatkan Bimbingan Teknik ADB; Jumlah buku data kependudukan per semester dan buletik kependudukan Provinsi Jawa Timur yang diterbitkan

Program Pencatatan sipil
IK : Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun; Persentase cakupan kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan; Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan; Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraianya dilaporkan

Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi
IK : Jumlah Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan SIAK dan Data Pelayanan Kependudukan yg telah terkonsolidasi dgn BIG Data

Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi
IK : Kepemilikan Dokumen Kependudukan KTP, Persentase Kab/Kota yang telah melaksanakan Pelayanan pencatatan Sipil penduduk sesuai standar

Pelayanan Pencatatan Sipil
IK : Persentase Kab/Kota yang telah menyelenggarakan pendaftaran kependudukan sesuai standar
IK : Persentase Kab/Kota yang melaksanakan pelayanan pencatatan Sipil sesuai standar

Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
IK : Jumlah Kab/Kota yang mendapatkan Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

ESELON 4

Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil
IK : Jumlah Kab/Kota yang telah melaksanakan kebijakan teknis di bidang pencatatan sipil berdasarkan kebijakan nasional

Penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penyusunan pelaporan adminduk terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan
IK : Jumlah Kab/Kota yang mengikuti Peningkatan SDM dan SOP Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpadu di Jawa Timur

Penyediaan data kependudukan provinsi
IK : 1. Jumlah data registrasi dari Kab/Kota
2. Jumlah peserta peningkatan SDM dalam rangka Pengembangan Penyelarasan Program Administrasi Kependudukan se Jawa Timur

Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi
IK : Jumlah Kab./Kota yang telah melaksanakan SOP Pelayanan Pencatatan Sipil

Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang bersifat Data Perseorangan, data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota
IK : Jumlah peserta Pembinaan SDM penyusunan SOP, program kerja, monitoring, evaluasi dan Pengelolaan Data Kependudukan Kab./Kota

Penyusunan profil Data perkembangan dan proyeksi Kependudukan Serta kebutuhan yang lain
IK : 1. Jumlah Profil Perkembangan Kependudukan yang telah disusun
2. Jumlah Profil yang telah diinventarisir dari Kab/Kota

Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil
IK : Jumlah Kab/Kota yang mengikuti Peningkatan SDM dan SOP Kebijakan Pencatatan Sipil di Jawa Timur

Fasilitasi terkait pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan
IK : Jumlah Kab/Kota yang terfasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil
IK : Pembinaan, Fasilitasi, Sosialisasi, Bimbingan Teknik, Advokasi, supervisi dan Konsultasi Pencatatan Sipil Kab/Kota

Sosialisasi terkait pengelolaan informasi Administrasi kependudukan
IK : Jumlah Kab./Kota yang tersosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil
IK : Peningkatan SDM Petugas Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil Kab/Kota

Komunikasi, Informasi, Edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat
IK : Jumlah Informasi Administrasi Kependudukan

Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil
IK : Jumlah Kab/Kota yang telah melaksanakan Pencatatan Sipil Penduduk sesuai standar

Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
IK : Jumlah Fasilitas Pemanfaatan Data Kependudukan dgn OPD, Lembaga dan Lembaga Non Pemerintah

Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil
IK : Jumlah Kab./Kota yang mengikuti Bimtek terkait Pencatatan Sipil

Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
IK : Jumlah Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan SIAK dan Data Kependudukan yang telah terkonsolidasi oleh Pusat

Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan
IK : Jumlah peserta Peningkatan SDM Bimbingan Teknis Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan kab./kota

PELAKSANA

Jumlah laporan bulanan data kependudukan

Data kependudukan bersih per semester

Jumlah laporan Money

